

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

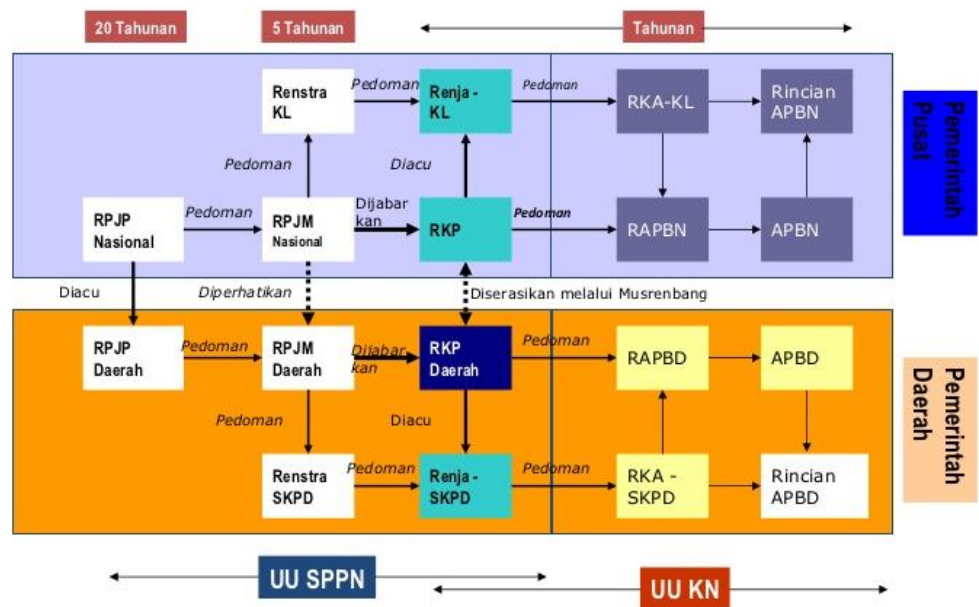
Perencanaan strategis memiliki peran krusial dalam pembangunan daerah, menjadi panduan utama dalam mengarahkan pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemilu serentak nasional dijadwalkan pada tahun 2024. Meskipun daerah dengan RPJMD berakhir pada 2024, tetap diperlukan dokumen pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu Kepala Daerah secara nasional di tahun tersebut.

Oleh karena itu, perlu adanya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program serta kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses ini juga diarahkan untuk menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif, melibatkan semua *stakeholders* pembangunan dan masyarakat Kota Kediri. Selain itu, penyusunan Renstra diharapkan dapat memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra PD disusun melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra PD, penyusunan rancangan Renstra PD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra PD, hingga penetapan Renstra PD. Kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan seperti tertera pada Bagan 1.1.

Bagan 1.1 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri merujuk pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026, dan juga mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait, termasuk Renstra Kementerian Perdagangan, Renstra Kementerian Perindustrian, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, dan dokumen terkait lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Renstra tersebut sesuai dengan konteks dan arah pembangunan yang lebih luas, serta mencerminkan koordinasi yang baik antara tingkat daerah, provinsi, dan nasional.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1).
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020–2024.
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri.
10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri.
11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2025-2026 memiliki maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, bersama dengan para stakeholder, dalam rangka membangun kesepahaman dan komitmen bersama. Hal ini bertujuan mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri secara berkesinambungan, yang diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan daerah dengan kualitas terbaik untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Kediri.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada periode Tahun 2025-2026. Penggunaan RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sebagai pedoman sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri.
- b. Mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir. Melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja, diharapkan pencapaian tujuan dapat diukur dengan jelas.
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri. Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan, kemudian menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dengan demikian, kesinambungan perencanaan dan pengelolaan anggaran dapat terwujud secara terencana dan terarah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan secara singkat pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan dengan RPJMD, Renstra K/ L, Renstra provinsi/ kabupaten/ kota, dan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Berisi penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah dan susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, termasuk capaian SPM dan SDG's.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Berisi hasil analisis dan penjabaran terkait dengan kelompok sasaran yang diberikan pelayanan oleh Perangkat Daerah.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

Pada bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.

3.2 Penentuan Isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor pada pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri beserta cascading kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

4.1 Tujuan dan Sasaran

4.2 Cascading Kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output serta indikatornya masing-masing

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2025 – 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri.

BAB VI RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, taget, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri (IKU dan IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA KEDIRI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri menduduki posisi sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian. Selain itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian berada di bawah tanggung jawab langsung Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dengan kedudukan ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri memiliki tanggung jawab membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan dan perindustrian, serta tugas pembantuan lainnya.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri bertanggung jawab melaksanakan fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan dan perindustrian. Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan. Adapun fungsi Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan dibidang perdagangan dan perindustrian;
- Pelaksanaan kebijakan dibidang perdagangan dan perindustrian;
- Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang perdagangan dan perindustrian;
- Pelaksanaan administrasi kedinasan dibidang perdagangan dan perindustrian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan, administrasi keuangan dan penyusunan program kegiatan di lingkungan Badan. Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut :

- Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan;
- Pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) dibidang kepegawaian;
- Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- Pengelolaan jasa penunjang urusan di dinas;
- Pengelolaan penunjang sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik;

- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dan kinerja dinas;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi satu sub bagian yaitu:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, dokumentasi dan kearsipan;
 - Menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian;
 - Menyiapkan bahan pengelolaan aset dan barang milik daerah;
 - Menyiapkan bahan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perundangundangan;
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
 - Menyiapkan bahan pengelolaan jasa penunjang;
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;
 - Menyiapkan bahan kebijakan peningkatan disiplin pegawai;
 - Menyiapkan bahan dan sarana prasarana rapat koordinasi dan konsultasi;
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pengembangan Perdagangan

Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri, kebijakan stabilitasi harga barang dan rekomendasi perizinan usaha. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai fungsi:

- Penerbitan rekomendasi perizinan dan non perizinan usaha perdagangan dalam negeri;
- Pengendalian dan pengawasan fasilitas penyimpanan, pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di wilayah kota;
- Pengembangan dan peningkatan sarana distribusi perdagangan;
- Pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kota;
- Pelaksanaan kebijakan stabilitasi dan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting bagi masyarakat;
- Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- Pengembangan perdagangan luar negeri;
- Pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan pelaporan penyelenggaraan perdagangan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

d. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan perencanaan dan pembangunan industri, pengendalian usaha izin usaha industri, dan pengelolaan sistem informasi industri nasional. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- Penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan industri;
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sumber daya, sarana dan prasarana, dan pemberdayaan industri serta peran serta masyarakat;

- Pengendalian izin usaha industri daerah;
- Pengelolaan informasi industri;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas bidang perindustrian; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

e. Bidang Kemetrolagian

Bidang Kemetrolagian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan standarisasi dan perlindungan konsumen. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Kemetrolagian mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan metrologi legal;
- Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana metrologi legal;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang metrologi legal; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, diperlukan dukungan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

2.2.1. Sumber Daya Manusia/ Aparatur

Jumlah sumber daya manusia atau aparatur yang tersedia di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri sebanyak 59 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Klasifikasi Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	1	3	4
3	Eselon IV	-	1	1
4	Jabatan Fungsional Tertentu	6	4	10
5	Jabatan Pelaksana	12	9	21
6	Tenaga Kontrak	19	3	22
	Jumlah	39	20	59

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang Ilmu di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2023

No.	Jabatan	Tingkat Pendidikan								Jumlah (Orang)
		SD	SMP	SMA	D1	D3	S1	S2	S3	
1	Eselon II	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Eselon III	-	-	-	-	-	-	4	-	4
3	Eselon IV	-	-	-	-	-	-	1	-	1
4	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	7	3	-	10
5	Jabatan Pelaksana	-	-	-	-	-	14	1	-	15
6	Tenaga Kontrak	-	3	6	-	1	12	-	-	22
	Jumlah	-	3	6	-	1	33	10	-	59

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

2.1.2. Sarana dan Prasarana

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri memiliki berbagai sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya. Aset tetap yang dimiliki oleh Dinas tersebut meliputi:

Tabel 2.3 Rincian Aset Tetap Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2023

No.	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
1	Tanah Bangunan kantor Pemerintah	4	4	-
2	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Air Kotor/ Air Limbah	1	1	-
3	Mobil Dinas Jabatan/ Operasional	3	2	1
4	Sepeda Motor Dinas / Operasional	16	14	2
5	Lemari Besi	10	8	2
6	Lemari Sorok	3	3	-
7	Filling Kabinet	15	11	4
8	lemari Kaca	6	6	-
9	CCTV	5	3	2
10	Kursi Rapat	50	26	24
11	Kursi Putar	10	2	8
12	Kursi Kerja	60	31	29
13	Meja Kerja	60	31	29
14	Bangku Tunggu	5	3	2
15	Sofa	6	6	-
16	AC	20	12	8
17	Komputer	42	33	9
18	Printer	42	30	12
19	Laptop	16	14	2
20	LCD Proyektor	2	1	1

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

2.3 Kinerja Layanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

Pencapaian kinerja layanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri dapat menentukan sejauh mana target dan realisasi program serta kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri dapat dilihat dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2019 - 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Renstra					Realisasi Kinerja Renstra				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Usaha dan Pengamanan Perdagangan	Neraca perdagangan	Rp M	N/ A	88.573,38	83.000	86.000	89.000	88.525,38	84.957,82	91.432,26	98.155,46	N/ A
		Indeks Tertib Ukur	%	N/ A	N/ A	58	62	67	N/ A	37	73,3	81,3	71,24
2	Meningkatnya Wirausaha Baru Sektor Perdagangan	Persentase penciptaan wirausaha baru sektor perdagangan	%	N/ A	23,1	35	50	65	N/ A	23,1	32,8	178,86	495,66
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri terutama Industri Kreatif	Pertumbuhan industri	%	2,51	5,83	12,20	12,30	12,40	7,98	12,12	18	79,5	55,90
		Pertumbuhan 5 subsektor ekonomi kreatif (industri kreatif)	%	N/ A	7,17	9,60	14,60	15,29	18,87	15,88	16,65	93,5	88,60
4	Meningkatnya Wirausaha Baru Sektor Perindustrian	Persentase penciptaan wirausaha baru sektor perindustrian	%	N/ A	18,1	35	50	65	N/ A	18,1	33,3	210	445,40
5	Meningkatnya Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bapokting	Persentase penanganan ketidakstabilan harga dan kelangkaan bapokting	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Meningkatnya Kualitas Perencanaan,	Persentase pemenuhan kriteria renja berkualitas	%	N/ A	100	100	100	100	N/ A	100	100	100	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Renstra					Realisasi Kinerja Renstra				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang berkualitas	%	N/ A	100	100	100	100	N/ A	100	100	100	100
		Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	-	N/ A	73	75	75	76	N/ A	73	78,29	80,24	N/ A

Sumber: LKjIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2022-2023

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, nomenklatur program pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri yang tercantum dalam RPJMD Perubahan Tahun 2020-2024 telah disesuaikan dengan aturan dan pedoman tersebut. Dalam RPJMD, terdapat 10 program di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, meliputi:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Program Pengembangan Ekspor
5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota
9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Untuk informasi mengenai anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri pada periode tahun 2020-2023, dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2019 - 2023

URAIAN	ANGGARAN (Rp)					REALISASI (Rp)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Daerah										
Pendapatan Asli Daerah										
Retribusi Daerah	150.000.000	105.000.000	150.000.000	120.000.000	120.167.500	222.442.500	158.277.500	129.715.000	139.072.500	271.631.500
Belanja Daerah										
Belanja Operasi										
Belanja Pegawai	4.970.136.400	5.358.902.295	5.625.982.578	5.901.607.878	5.460.695.600	4.082.075.957	4.024.559.914	4.935.939.546	5.098.474.540	4.797.689.317
Belanja Barang dan Jasa	4.097.999.890	3.197.599.240	5.123.279.232	15.635.605.659	32.619.771.446	3.829.650.824	2.437.346.053	2.742.063.549	14.292.690.089	31.900.559.893
Belanja Hibah		-	300.000.000	-	400.000.000	-	-	300.000.000	-	400.000.000
Belanja Bantuan Sosial		-	-	-	-	-	-	-	-	
Belanja Modal										
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.908.701.229	634.839.179	683.041.230	584.524.500	151.131.500	823.259.211	36.720.000	163.370.400	563.423.400	146.913.727
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	889.250.000	100.000.000	-	-	-	177.374.416,53	-	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	1.195.000.000	-	-	-	-	958.593.385	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.000.000	99.700.000	12.000.000	-	-	13.937.000	98.659.000	12.000.000	-	-
Total Belanja	11.880.087.519	9.391.040.714	12.939.303.040	22.121.738.037	38.631.598.546	8.926.297.408,53	6.597.284.967	9.111.966.880	19.954.588.029	37.245.162.937
Rasio Penyerapan Anggaran						75,14%	70,25%	70,42%	90,20%	96,41%

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

Tabel 2.6 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran (rasio antara realisasi dan anggaran) pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri selama periode 2020–2023 terus mengalami peningkatan. Rata-rata tingkat penyerapan belanja operasi (belanja pegawai) selama periode tersebut mencapai 84,27%. Sementara itu, rata-rata penyerapan belanja barang dan jasa serta belanja modal pada tahun 2020-2023 sebesar 77,58%. Adapun rata-rata pertumbuhan anggaran selama periode 2020–2023 adalah sebesar 2,56%, sementara rata-rata pertumbuhan realisasi dalam periode yang sama mencapai 45,49%. Pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian, memiliki sasaran pelayanan sesuai dengan fungsi, urusan, dan kewenangannya sebagaimana diuraikan pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.6 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

No.	Bidang	Layanan	Sasaran Layanan	Mitra Layanan
1	Bidang Pengembangan Perdagangan	▪ Fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang ▪ Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan ▪ Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan ▪ Pameran dagang nasional ▪ Promosi penggunaan produk dalam negeri ▪ Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri ▪ Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang, agen dan pasar rakyat ▪ Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus ▪ Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	▪ Pelaku usaha perdagangan, baik formal maupun informal di tingkat distributor hingga retail ▪ Pengelola sarana distribusi perdagangan ▪ Pelaku industri kecil menengah (IKM)	▪ Kementerian/ Lembaga/ Instansi Pusat ▪ Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur ▪ Perangkat Daerah/ BUMD yang mendukung kinerja Dinas, seperti DPMPTSP, Perumda Pasar Joyoboyo, dsb ▪ Penyelenggara pameran dagang ▪ Kejaksaan Negeri Kota Kediri ▪ Polresta Kediri ▪ Lembaga swasta lain yang bekerjasama dengan Pemkot Kediri dan mempunyai keterkaitan dengan upaya pencapaian kinerja Dinas, seperti KADIN, <i>Supplier</i> Bapokting, dsb

No.	Bidang	Layanan	Sasaran Layanan	Mitra Layanan
2	Bidang Perindustrian	▪ Pendampingan usaha dan peningkatan kualitas produk IKM ▪ Fasilitasi sertifikat halal reguler ▪ Fasilitasi merek ▪ Pendataan mesin pelinting rokok ▪ Pemantauan dan Pengawasan izin sektor industri ▪ Fasilitasi pembuatan dan pengisian akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) ▪ Promosi produk-produk IKM	▪ Pelaku IKM ▪ Wirausaha sektor perindustrian dan perdagangan ▪ Perusahaan rokok	▪ Kementerian/ Lembaga/ Instansi Pusat ▪ Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur ▪ Perangkat Daerah/ BUMD yang mendukung kinerja Dinas, seperti DPMPTSP, dsb ▪ Penyelenggara <i>event</i> promosi produk IKM ▪ Kejaksaan Negeri Kota Kediri ▪ Polresta Kediri ▪ Lembaga swasta lain yang bekerjasama dengan Pemkot Kediri dan mempunyai keterkaitan dengan upaya pencapaian kinerja Dinas, seperti RUMah Kurasi, dsb
3	Bidang Kemetrolagian	▪ Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang ▪ Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	▪ Pemilik alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) ▪ Pelaku usaha ▪ Masyarakat	▪ Direktorat Metrologi ▪ BSML Regional II Yogyakarta ▪ Perangkat Daerah/ BUMD yang mendukung kinerja Dinas, seperti Perumda Pasar Joyoboyo, dsb ▪ Penyedia jasa perbaikan UTTP

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan pencapaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, antara lain:

- 1. Keterbatasan Infrastruktur Pendukung Perdagangan**
Sarana Distribusi Perdagangan yang belum sepenuhnya memadai dapat mempengaruhi distribusi barang.
- 2. Kualitas dan Ketersediaan Tenaga Kerja**
Perlunya peningkatan kualifikasi dan jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk beradaptasi dengan teknologi baru.
- 3. Perluasan Pasar dan Diversifikasi Ekspor**
Keterbatasan dalam mencapai pasar baru dan diversifikasi ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada beberapa komoditas ekspor dan negara tujuan tertentu.
- 4. Pengelolaan Limbah Industri yang Tidak Optimal**
Perlunya peningkatan dalam pengelolaan limbah industri untuk menjaga lingkungan dan memenuhi standar keberlanjutan.

5. **Ketergantungan pada Bahan Baku dari Luar Wilayah**

Upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan bahan baku dari luar wilayah untuk meminimalkan risiko pasokan.

6. **Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Sektor Perdagangan dan Perindustrian**

Perlunya pengembangan SDM yang kompeten, seperti tenaga fungsional penera, analis perdagangan, dan penyuluh perindustrian dan perdagangan untuk menjamin pelayanan yang optimal di bidang perdagangan dan perindustrian sesuai dengan standar yang diharapkan.

7. **Ketidakpastian Global**

Ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi negara-negara mitra dagang, perubahan kebijakan ekonomi negara besar turut berpengaruh terhadap kinerja ekspor Kota Kediri.

8. **Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Perlunya menyelaraskan berbagai aspek infrastruktur, seperti jaringan transportasi, ruang publik, dan fasilitas pendukung lainnya dan regulasi yang lebih baik guna meningkatkan aksesibilitas dan tata letak yang lebih teratur demi menciptakan lingkungan usaha yang lebih teratur dan aman bagi PKL.

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang ada adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Industri Kreatif Lokal**

Dukungan terhadap industri kreatif sebagai sumber inovasi dan pertumbuhan ekonomi baru yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi di Kota Kediri.

2. **Pemanfaatan Potensi Teknologi dan Revolusi Industri 4.0**

Kesempatan untuk menerapkan teknologi dan inovasi dalam proses produksi guna meningkatkan efisiensi dan daya saing industri.

3. **Pembangunan Infrastruktur Pendukung Ekonomi**

Perkembangan infrastruktur seperti bandara dan jalan tol dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi dengan menarik investasi baru dan meningkatkan konektivitas regional.

4. **Promosi Produk Lokal melalui Digitalisasi**

Pemanfaatan platform digital dan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar produk lokal dari Kota Kediri.

5. **Besarnya Pangsa Pasar Dalam Negeri**

Potensi pasar produk unggulan Kota Kediri di dalam negeri meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah populasi dan daya beli penduduk Indonesia, menciptakan peluang yang baik.

6. **Peningkatan Kinerja Perizinan**

Proses perizinan yang mudah dan cepat, membuka peluang bagi pertumbuhan sektor perdagangan dan perindustrian serta memperluas peluang investasi di Kota Kediri.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA KEDIRI

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan.

Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis, diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Analisis dilakukan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan muncul dalam dua tahun mendatang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini, serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2021, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri memiliki tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri berfungsi untuk merumuskan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, beberapa permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Perdagangan
 - Masih rendahnya kualitas produk-produk lokal;
 - Perlu peningkatan perlindungan konsumen melalui layanan kemetrollogian yang sesuai standar;
 - Masih terjadinya fluktuasi harga barang pokok penting yang berdampak terhadap inflasi;
 - Masih kurangnya penataan sektor perdagangan informal; dan
 - Kurangnya pengawasan dan ketepatan penyaluran sasaran barang pokok penting.
 - Makin besarnya persaingan baik produk maupun harga antara barang impor dan buatan dalam negeri yang jadi komoditas perdagangan.
 - Kurang optimalnya infrastruktur yang mendukung kegiatan perdagangan, seperti fasilitas pergudangan.
 - Terbatasnya kerjasama dan akses industri kecil menengah dalam kegiatan ekspor impor serta terbatasnya diversifikasi tujuan pasar ekspor.
- b. Bidang Perindustrian
 - Belum optimalnya daya saing Industri Kecil Menengah (IKM) baik dalam hal standarisasi produk dan *packaging*, sarana-prasarana, kemampuan mengakses modal maupun penerapan teknologi digital; dan
 - Belum optimalnya peningkatan pemasaran produk IKM.
 - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna, sebagai upaya untuk menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan kapasitas produksi.
 - Bahan baku industri masih impor sehingga mengakibatkan biaya produksi tinggi.

- Kurangnya industri yang berwawasan lingkungan sehingga masih belum banyak penanganan limbah industri.
- Kurangnya program yang cukup mendukung industri kreatif lokal seperti kerajinan dan produk-produk unggulan daerah.

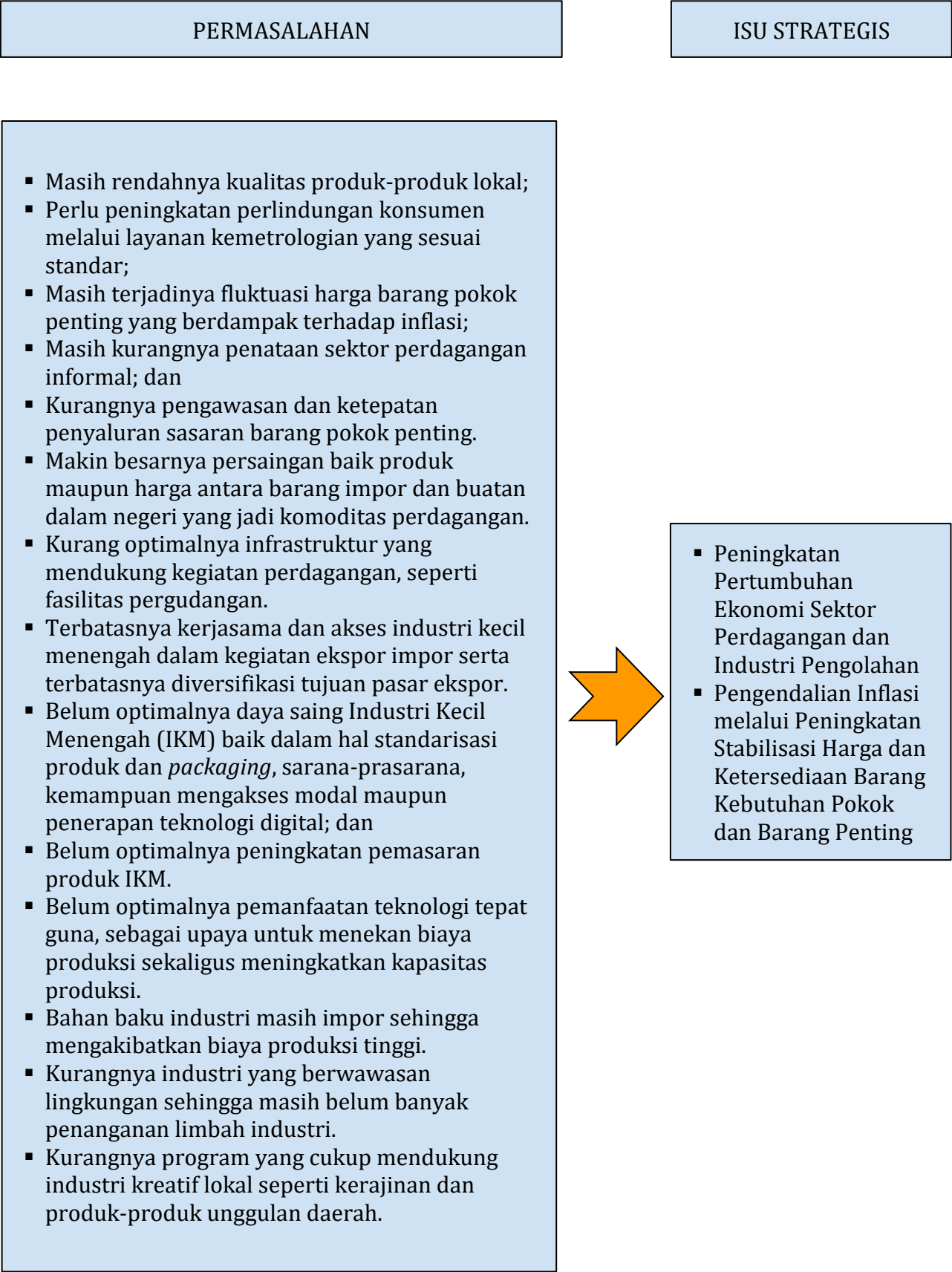
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara ini juga mencakup evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perdagangan dan perindustrian. Adapun isu-isu strategis yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.1 Permasalahan dan Isu Strategis



BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Rumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Ini akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun ke depan. Tujuan mencerminkan dampak kesuksesan pembangunan daerah yang dihasilkan dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sementara itu, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu dua tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, serta target kinerja sasaran dalam dua tahun mendatang dapat dilihat dalam Tabel 4.1. Sedangkan informasi lebih lanjut mengenai Matriks Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri tahun 2025-2026 dan Rencana Kerja selama tahun 2025-2026 dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target		Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
			2025	2026			2025	2026
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Nilai Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	Rp1,55 T	Rp1,65 T	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan dan Promosi serta Pemasaran Produk Lokal/ Potensial Ekspor	Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	32%	33%
						Persentase Promosi Produk Lokal/ Potensial Ekspor	13,66%	15,08%
					Meningkatnya Pelaksanaan Metrologi Legal	Indeks Tertib Ukur	73	75
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Nilai Peningkatan PDRB Sektor Industri	Rp4 T	Rp4,2 T	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing IKM dan Produk Lokal	Pertumbuhan Industri	12,8%	13%
3	Meningkatnya Stabilitas Harga melalui Pengendalian Inflasi	Indeks Stabilitas Harga	110	108	Meningkatnya Stabiisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	8,5%	8%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri	Nilai SAKIP Kota Kediri	73	75	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian	LHE AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian	90	91

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri adalah:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan yang diukur dengan indikator tujuan Nilai Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perindustrian yang diukur dengan indikator tujuan Nilai Peningkatan PDRB Sektor Industri.
3. Meningkatkan Stabilitas Harga melalui Pengendalian Inflasi yang diukur dengan indikator tujuan Indeks Stabilitas Harga.

4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri.
- Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran antara lain:
- a. Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan dan Promosi serta Pemasaran Produk Lokal/ Potensial Ekspor;
 - b. Meningkatkan Pelaksanaan Metrologi Legal;
 - c. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing IKM dan Produk Lokal;
 - d. Meningkatnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; dan
 - e. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan yang ada.

Tabel 4.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Tujuan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Formula Indikator
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Nilai Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	Selisih antara nilai PDRB ADHK sektor perdagangan pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya	PDRB sektor perdagangan tahun [n - (n-1)]
2	Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan	Nilai Peningkatan PDRB Sektor Industri	Selisih antara nilai PDRB ADHK sektor industri pengolahan pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya	PDRB industri pengolahan tahun [n - (n-1)]
3	Meningkatnya stabilitas harga dalam rangka penurunan kemiskinan	Indeks Stabilitas Harga	Nilai rata-rata tingkat kestabilan harga Bapokting dalam periode waktu tertentu	Total nilai indeks stabilitas harga Bapokting / Jumlah komoditas Bapokting $Indeks\ Stabilitas\ Harga = \frac{\sum_{i=1}^n P_{i1} \times Q_{i0}}{\sum_{i=1}^n P_{i0} \times Q_{i0}}$ <i>P_{i1}</i> = harga komoditas pada periode saat pengukuran <i>P_{i0}</i> = harga komoditas pada periode awal (periode referensi) <i>Q_{i0}</i> = jumlah komoditas pada periode awal (periode referensi)
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri	Nilai SAKIP Kota Kediri	Hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri	Realisasi nilai SAKIP Kota Kediri tahun n

Tabel 4.3 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formula Indikator
1	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan dan Promosi serta Pemasaran Produk Lokal/ Potensial Ekspor	Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase selisih jumlah sarana distribusi perdagangan tahun pengukuran dengan tahun sebelumnya, dibagi jumlah tahun sebelumnya	Jumlah sarana distribusi perdagangan tahun {[n - (n-1)]/ (n-1)} x 100%
		Persentase Promosi Produk Lokal/ Potensial Ekspor	Perbandingan antara jumlah produk lokal/ potensial ekspor yang dipromosikan dengan jumlah produk lokal/ potensial ekspor	Jumlah Produk Lokal/ Potensial Ekspor yang Dipromosikan / Jumlah Produk Lokal/ Potensial Ekspor×100%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Metrologi Legal	Indeks Tertib Ukur	Indeks yang mengukur pencapaian tertib ukur dengan indikator Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang beredar di masyarakat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	(68,4% x persentase UTTP bertanda tera sah) + (31,6% x persentase BDKT memenuhi kesesuaian pelabelan dan kuantitas)
3	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing IKM dan Produk Lokal	Pertumbuhan Industri	Persentase selisih jumlah jumlah unit usaha industri (industri kecil, menengah dan besar baik industri formal/ berizin maupun non formal/ belum berijin, termasuk unit usaha dalam sentra-sentra industri) tahun pengukuran dengan tahun sebelumnya, dibagi jumlah tahun sebelumnya	Jumlah Industri tahun {[n - (n-1)]/ (n-1)} x 100%
4	Meningkatnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	Tingkat fluktuasi atau variasi harga dari berbagai komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam rentang waktu tertentu	Rata-rata Standar Deviasi Harga Komoditas Tahun ke-n / Rata-rata Harga Komoditas Tahun ke-n x 100%
5	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian	LHE AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Realisasi nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun n

Tabel 4.4 Definisi Operasional dan Formula Indikator Program

No.	Program	Indikator Program	Definisi Operasional	Formula Indikator
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Perbandingan antara jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan dengan jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan / Jumlah pelaku usaha x 100%
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibina	Perbandingan antara jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibina dengan jumlah sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibina s.d tahun n / Jumlah sarana distribusi perdagangan s.d tahun n x 100%
3	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pelaku Usaha Yang Menjadi Eksportir	Perbandingan antara pelaku usaha yang menjadi eksportir dengan jumlah pelaku usaha produk unggulan/ potensial ekspor	Jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir s.d tahun n / Jumlah pelaku usaha produk unggulan/ potensial ekspor s.d tahun n x 100%
4	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase kenaikan omzet pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi kemitraan, pameran dan promosi lainnya	Perbandingan antara jumlah pelaku usaha yang omzetnya naik yang memperoleh fasilitasi kemitraan, pameran dan promosi lainnya dengan jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi kemitraan, pameran dan promosi lainnya	Jumlah pelaku usaha yang omzetnya naik yang memperoleh fasilitasi kemitraan, pameran dan promosi lainnya / Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi kemitraan, pameran dan promosi lainnya x 100%
5	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	Perbandingan antara UTTP bertanda tera sah yang berlaku dengan UTTP yang terdata	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun n / Jumlah UTTP yang terdata sampai dengan tahun n x 100%
6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang memenuhi standar	Perbandingan antara jumlah IKM yang memenuhi standar dengan jumlah IKM	Jumlah IKM yang memenuhi standar s.d tahun n / Jumlah IKM s.d tahun n x 100%
7	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Persentase Pemantauan dan Pengawasan Izin Sektor Industri	Perbandingan antara jumlah izin sektor industri yang dipantau dan diawasi dengan jumlah izin sektor industri yang dikeluarkan	Jumlah izin sektor industri yang dipantau dan diawasi / Jumlah izin sektor industri yang dikeluarkan x 100%
8	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data IKM yang masuk dalam SIINas	Perbandingan antara jumlah IKM yang masuk SIINas dengan jumlah IKM yang wajib SIINas	Jumlah IKM yang masuk SIINas s.d tahun n / Jumlah IKM wajib SIINas s.d tahun n x 100%
9	Program Stabilisasi Harga Barang	Persentase Penanganan Ketidakstabilan	Perbandingan antara jumlah dan penanganan	Jumlah penanganan ketidakstabilan harga &

No.	Program	Indikator Program	Definisi Operasional	Formula Indikator
	Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Harga dan Kelangkaan Bapokting	ketidakstabilan harga dan kelangkaan Bapokting dengan jumlah kejadian ketidakstabilan harga dan kelangkaan Bapokting dengan memperhatikan kecepatan respon terhadap kejadian tersebut	kelangkaan Bapokting / Jumlah kejadian x 100%
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	Rasio antara jumlah kriteria Renja yang telah terpenuhi pada seluruh program dengan perkalian antara jumlah program dan jumlah kriteria Renja	Jumlah kriteria Renja yang terpenuhi pada seluruh program / (Jumlah program x kriteria Renja) x 100 %
		Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	Rasio antara jumlah kriteria yang terpenuhi pada seluruh laporan keuangan dan aset dengan perkalian antara jumlah laporan keuangan dan aset	Jumlah kriteria yang terpenuhi pada seluruh laporan keuangan dan aset / (Jumlah laporan keuangan dan aset x kriteria laporan) x 100 %
		Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	Nilai yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN	Realisasi nilai IPA tahun n

Tabel 4.5 Definisi Operasional dan Formula Indikator Kegiatan

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi dan Pemantauan Izin Sektor Perdagangan	Jumlah kegiatan pelayanan rekomendasi dan pemantauan terhadap izin sektor perdagangan yang dilakukan oleh Dinas	Jumlah kegiatan pelayanan rekomendasi dan pemantauan izin sektor perdagangan tahun n
2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Pelayanan Rekomendasi Penerbitan TDG	Rasio antara jumlah permohonan penerbitan TDG yang mendapatkan rekomendasi dengan total jumlah permohonan penerbitan TDG yang diajukan	Jumlah rekomendasi TDG yang terbit tahun n / Jumlah permohonan rekomendasi TDG tahun n x 100%
3	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Dibangun/ Dikelola	Jumlah total sarana distribusi perdagangan yang telah dibangun atau dikelola oleh Dinas	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/ dikelola sampai dengan tahun n

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
4	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi operasional	Total kegiatan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi tahun n
5	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi promosi dan pembinaan ekspor	Jumlah pelaku usaha yang menerima dukungan dan fasilitasi dalam hal promosi dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan ekspor produknya	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi promosi dan pembinaan ekspor tahun n
6	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah kegiatan promosi dan pemasaran produk lokal di dalam negeri yang dilakukan oleh Dinas	Jumlah kegiatan promosi dan pemasaran produk dalam negeri tahun n
7	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelayanan Tera / Tera Ulang	Rasio antara jumlah pelayanan tera atau tera ulang yang telah dilakukan dengan total permohonan	Jumlah pelayanan tera atau tera ulang tahun n / Jumlah permohonan tera atau tera ulang
8	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Pembangunan dan Pemberdayaan IKM	Jumlah kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) yang dilakukan oleh Dinas	Jumlah kegiatan pembangunan dan pemberdayaan IKM tahun n
9	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Verifikasi dan Pengawasan Izin Sektor Industri	Jumlah kegiatan verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha dan pengawasan terhadap izin sektor industri yang dilakukan oleh Dinas	Jumlah kegiatan verifikasi dan pengawasan izin sektor industri tahun n
10	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM Yang Sudah Memiliki Akun/ Melaporkan Kegiatan Usahnya di SIINas	Jumlah pelaku usaha IKM yang sudah memiliki akun atau melaporkan kegiatan usahanya di SIINas sampai dengan tahun tertentu	Jumlah IKM yang sudah memiliki akun atau melaporkan kegiatan usahanya di SIINas sampai dengan tahun n
11	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi Penyediaan Bapokting	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam penyediaan Bapokting	Jumlah kegiatan koordinasi penyediaan Bapokting tahun n

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
12	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Bapokting	Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan terhadap Bapokting	Total kegiatan pengawasan dan pengendalian Bapokting tahun n
13	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan pupuk serta pestisida bersubsidi	Jumlah kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi tahun n
14	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan RB	Jumlah dokumen yang terkait dengan perencanaan, evaluasi kinerja, dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi kinerja, dan RB tahun n
15	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan	Pelayanan administrasi keuangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku	Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan tahun n
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	Pelayanan administrasi umum yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku	Jumlah pelayanan administrasi umum terlaksana / Jumlah total pelayanan administrasi umum yang direncanakan x 100%
17	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa penunjang yang telah dilaksanakan untuk mendukung urusan pemerintahan daerah	Jumlah penyediaan jasa yang terlaksana / Jumlah penyediaan jasa yang direncanakan x 100%
18	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD	Pengadaan barang milik daerah yang telah terlaksana	Jumlah paket pengadaan BMD
19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD	Kegiatan pemeliharaan terhadap barang milik daerah yang telah terlaksana	Jumlah pemeliharaan BMD yang terlaksana / Jumlah pemeliharaan BMD yang direncanakan x 100%
20	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan kapasitas ASN	Kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN yang telah terlaksana	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas ASN

Tabel 4.6 Definisi Operasional dan Formula Indikator Subkegiatan

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemohon untuk memenuhi komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen tahun n
2	Fasilitasi Pembinaan dan Pemantauan Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Distributor, Agen, Grosir/ Perkulakan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Perizinan Berusaha Melalui Sistem Elektronik	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pemantauan Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Distributor, Agen, Grosir/ Perkulakan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Perizinan Berusaha Melalui Sistem Elektronik	Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/ perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik dengan alat ukur Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/ perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik dengan satuan laporan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/ perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik tahun n
3	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah dokumen penerbitan Tanda Daftar Gudang yang difasilitasi selama suatu periode	Jumlah dokumen Tanda Daftar Gudang tahun n
4	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya sarana distribusi perdagangan dengan alat ukur jumlah sarana distribusi perdagangan dengan satuan unit	Jumlah sarana distribusi perdagangan tahun n
5	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan dengan alat ukur jumlah fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan dengan satuan unit	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan tahun n
6	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan dengan alat ukur jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian tahun n

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			dengan satuan orang/ pengelola	
7	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya pemberdayaan oleh pengelola sarana distribusi perdagangan dengan alat ukur jumlah pemberdayaan oleh pengelola sarana distribusi perdagangan dengan satuan orang	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian tahun n
8	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Terfasilitasinya pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada Pameran Dagang Nasional dengan alat ukur jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang dengan satuan pelaku usaha dilaksanakan oleh sub bidang urusan perdagangan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang tahun n
9	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Terfasilitasinya pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada pelaksanaan misi dagang dengan alat ukur jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan dengan satuan pelaku usaha dilaksanakan oleh sub bidang urusan perdagangan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan tahun n
10	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Meningkatnya citra produk ekspor dengan alat ukur jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi dengan satuan produk dilaksanakan oleh sub bidang urusan perdagangan	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi tahun n
11	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM Yang Memperoleh Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Terlaksananya promosi penggunaan Produk Dalam Negeri di tingkat kabupaten/ kota dengan alat ukur jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas promosi penggunaan Produk Dalam Negeri di tingkat kabupaten/ kota dengan satuan UMKM	Jumlah UMKM Yang Memperoleh Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota tahun n
12	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di	Jumlah UMKM Yang Memperoleh Fasilitas Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan	Meningkatnya akses pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan	Jumlah UMKM Yang Memperoleh Fasilitas Pemasaran Produk Dalam

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
	Tingkat Kabupaten/ Kota	Dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi dengan alat ukur jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi dengan satuan UMKM	Negeri Melalui Kemitraan Dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi tahun n
13	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Meningkatnya kesesuaian alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan terhadap ketentuan yang berlaku dengan alat ukur jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan yang ditera ulang oleh Unit Metrologi Legal Kabupaten/ kota dengan satuan unit berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 tahun 2019 tentang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang dilaksanakan oleh sub bidang urusan perdagangan. Kegiatan operasional yang dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan adalah: - Verifikasi Standar Internal. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh UML untuk memastikan akurasi dari peralatan standar yang dimiliki sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Komponen kegiatan ini mencakup pengadaan tanda verifikasi. - Verifikasi Standar Eksternal ke BSML atau Direktorat Metrologi.	Jumlah UTTP yang ditera atau tera ulang tahun n

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk membawa standar milik UML ke BSML atau Direktorat Metrologi untuk dilakukan verifikasi memastikan akurasi dari standar ukuran. Komponen dari kegiatan ini mencakup perjalanan dinas ke lokasi BSML atau Ditrektorat Metrologi, penyediaan biaya pengujian/ verifikasi standar, penyediaan biaya asuransi peralatan standar selama perjalanan, dan/ atau pengiriman standar. - Pendataan/ Pemetaan dan Pemutakhiran Data Potensi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang Dan Alat Perlengkapan dan Wajib Tera. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mendata seluruh Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang Dan Alat Perlengkapan dan wajib tera yang ada di wilayah kabupaten/ kota. Komponen dari kegiatan ini adalah sensus terhadap wajib tera di wilayah kabuapaten/ kota dan penginputan data pada sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Metrologi. - Operasional Tera/ Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang Dan Alat Perlengkapan kegiatan ini merupakan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang di kantor dan lokasi tempat Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang Dan Alat Perlengkapan digunakan/ terpasang. Komponen kegiatan ini antara lain pengembangan mutu pelayanan di kantor,	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			penyediaan dukungan operasional pelaksanaan pelayanan di tempat Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang Dan Alat Perlengkapan terpasang atau digunakan, dan/ atau penyampaian informasi jadwal pelaksanaan tera dan tera ulang. - Pemeliharaan, renovasi dan pembangunan Sarana dan Prasarana. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa laboratorium uji dan peralatan standar yang dimiliki oleh UML tetap memenuhi persyaratan dan berfungsi dengan baik sehingga tetap menjaga akurasi hasil pengujian. Komponen kegiatan ini mencakup pemeliharaan laboratorium uji dan peralatan standar, renovasi laboratorium uji/ ruang pelayanan, pengadaan peralatan dan/ atau pembangunan sarana dan prasarana. - Cek Antara. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk memastikan konsistensi akurasi dari standar ukuran yang dimiliki oleh UML. - Interkomparasi Standar Kerja Antar UML. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk memastikan kesetaraan kemampuan Unit Metrologi Legal melalui kesetaraan standar ukuran dan kemampuan verifikasi UML yang dibandingkan dengan UML di regional masing-masing dan dikordinasikan oleh BSML. Komponen dari kegiatan ini mencakup	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			perjalanan dinas ke lokasi BSML atau Ditrektorat Metrologi, penyediaan biaya pengujian/ verifikasi standar, penyediaan biaya asuransi peralatan standar selama perjalanan, dan/ atau pengiriman standar. - Audit Internal. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh UML untuk memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Komponen kegiatan ini mencakup penyelenggaraan pertemuan secara internal. - Kaji Ulang Permintaan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh UML untuk mengevaluasi kesesuaian penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang dengan persyaratan yang telah ditetapkan secara keseluruhan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Komponen kegiatan ini mencakup penyelenggaraan pertemuan secara internal dan/ atau eksternal. - Penambahan Ruang Lingkup. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh UML untuk menambah ruang lingkup pelayanan. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Direktorat Metrologi berdasarkan	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			permohonan dari UML untuk memastikan pemenuhan persyaratan yang ada. Komponen kegiatan ini mencakup perjalanan dinas bagi tenaga assesor Direktorat Metrologi dan penyelenggaraan pertemuan secara internal dan/ atau eksternal. - Kaji Ulang Manajemen. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh UML untuk mengevaluasi kesesuaian penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang dengan persyaratan yang telah ditetapkan secara keseluruhan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Komponen kegiatan ini mencakup penyelenggaraan pertemuan secara internal dan/ atau eksternal. - Dukungan Surveillance (sebagai Asessi). Kegiatan ini merupakan kegiatan dukungan dari UML untuk memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan surveillance yang dilakukan oleh Direktorat Metrologi dalam memastikan konsistensi penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Komponen kegiatan ini mencakup penyelenggaraan pertemuan secara internal dan/ atau eksternal. - Pelatihan Fungsional Penera. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengembangkan	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			komptensi dan kemampuan SDM UML melalui keikutsertaan dalam pelatihan fungsional Penera yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian. Komponen kegiatan mencakup perjalanan dinas bagi peserta pelatihan dan/ atau penyediaan biaya pelatihan. - Pelatihan Teknis Penera. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengembangkan kompetensi dan kemampuan SDM UML melalui keikutsertaan dalam pelatihan teknis Penera yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan. Komponen kegiatan mencakup perjalanan dinas bagi peserta pelatihan pemanggilan tenaga pengajar dari luar dan/ atau penyediaan biaya pelatihan. - Pelaksanaan Uji Kompetensi. Kegiatan ini merupakan kegiatan terkait penilaian kemampuan/ kompetensi Penera yang dilakukan secara berkala oleh Direktorat Metrologi. Komponen kegiatan mencakup perjalanan dinas bagi peserta pelatihan dan/ atau penyediaan biaya uji kompetensi. - Penilaian Angka Kredit Penera. Kegiatan ini merupakan kegiatan penilaian angka kredit bagi Penera. Komponen kegiatan ini mencakup penyampaian berkas	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			PAK dan perjalanan dinas dalam hal kebutuhan penilaian bagi jenjang tertentu. - Pelaksanaan Magang, Coaching, Bimtek ke BSML / Ditmet. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengembangkan kompetensi dan kemampuan SDM UML melalui keikutsertaan dalam Magang, Coaching, Bimtek yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan penawaran yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Metrologi. Komponen kegiatan ini mencakup perjalanan dinas bagi peserta. - Pelatihan Manajemen Operasional Kemetrolgian. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengembangkan kompetensi dan kemampuan SDM UML melalui keikutsertaan dalam Pelatihan Manajemen Operasional Kemetrolgian yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan. Komponen kegiatan mencakup perjalanan dinas bagi peserta pelatihan dan/ atau penyediaan biaya pelatihan. - Harmonisasi Kegiatan Metrolgi Legal Regional. Kegiatan ini merupakan kegiatan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh UML di regional masing-masing dalam rangka mengharmonisasikan penyelenggaraan kegiatan kemetrolgian.	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			Komponen kegiatan ini mencakup perjalanan dinas bagi peserta. - Pertemuan Teknis Kemetrolagian Nasional. Kegiatan ini merupakan kegiatan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh UML secara nasional dalam rangka pembahasan dan uji publik prosedur teknis dan rancangan NSPK di bidang metrologi legal yang akan diterapkan maupun yang sudah diterbitkan sehigga NSPK di bidang metrologi legal dapat diimplementasikan dengan baik. Komponen kegiatan ini mencakup perjalanan dinas bagi peserta. - Sistem Informasi Layanan Tera/ Tera Ulang. Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka memanfaatkan sistem informasi terkait layanan tera dan tera ulang yang dibangun oleh Kementerian Perdagangan, seperti pelaporan tera dna tera ulang, pendataan wajib tera, verifikasi standar, pelayanan tera dan tera ulang. - Promosi layanan tera dan tera ulang. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat dan wajib tera terkait dengan layanan tera dan tera ulang. Kegiatan ini bisa berupa pembuatan banner, spanduk, stiker, sosialisasi tatap muka, webinar, penyuluhan, pembuatan video publikasi di radio, TV, media elektronik, media cetak, dan lain-lain	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
14	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Meningkatnya kesesuaian alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan dan barang dalam keadaan terbungkus terhadap ketentuan yang berlaku dengan alat ukur jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang bina yang meliputi wajib tera/ pengguna alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan sesuai dengan ruang lingkup pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 tahun 2019 tentang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 tahun 2019 tentang Tera dan/ atau tera ulang serta produsen/ pengemas barang dalam keadaan terbungkus sesuai dengan ruang lingkup pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 tahun 2011 tentang Barang Dalaqm Keadaan Terbungkus agar memenuhi kewajiban di bidang metrologi legal. Kegiatan pengawasan dan penyuluhan dilakukan berdasarkan data jumlah alat ukur, alat takarm alat timbang, dan alat perlengkapan serta jumlah sampel barang dalam keadaan terbungkus yang diambil dalam kegiatan pemantauan, pengamatan dan pengawasan kemetrologian. Kegiatan operasional yang dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan dan penyuluhan adalah - Pendataan/ Pemetaan Data Potensi dan kondisi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang Dan Alat Perlengkapan	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan atau pembinaan tahun n

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			dan BDKT. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendata dan memantau kondisi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang Dan Alat Perlengkapan dan BDKT. Komponen dari kegiatan ini adalah survei terhadap kondisi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang Dan Alat Perlengkapan dan BDKT di wilayah kabupaten/ kota dan penginputan data pada sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Metrologi. - Operasionalisasi Pengawasan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang Dan Alat Perlengkapan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan ALAT UKUR, Alat Takar, Alat Timbang Dan Alat Perlengkapan di wilayah kabupaten/ kota. Komponen kegiatan ini mencakup perjalanan dinas dalam rangka pengawasan di kabupaten/ kota, penyediaan perlengkapan pengawasan, pengadaan garis metrologi dan label barang dalam pengawasan - Penyuluhan Kemetrologian Melalui Tatap Muka, Media Cetak, Elektronik, Internet. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat dan wajib tera terkait dengan metrologi legal. Kegiatan ini bisa berupa pembuatan banner, spanduk, stiker, sosialisasi tatap muka,	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			webinar, penyuluhan, pembuatan video, publikasi di radio, TV, media elektronik, media cetak, dan lain-lain - Operasionalisasi Pengawasan BDKT. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan BDKT di wilayah kabupaten/ kota. Komponen kegiatan ini mencakup perjalanan dinas dalam rangka pengawasan di kabupaten/ kota, penyediaan perlengkapan pengawasan, pengadaan garis metrologi dan label barang dalam pengawasan. - Pembelian Sampling BDKT. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka membeli sampel BDKT yang akan diuji dalam rangka pengawasan BDKT yang dilakukan di post market. Komponen kegiatan ini mencakup pembelian sampel BDKT untuk dilakukan pengujian dalam rangka pengawasan. - Pengadaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Standar Kerja Pengawasan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memastikan Standar Kerja Pengawasan tetap memenuhi persyaratan dan berfungsi dengan baik sehingga tetap menjaga akurasi hasil pengujian. Komponen kegiatan ini mencakup pemeliharaan laboratorium uji dan peralatan standar, renovasi laboratorium	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			uji/ ruang pelayanan, pengadaan peralatan dan/ atau pembangunan sarana dan prasarana. - Audit Internal Pengawasan/ Penyuluhan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian penyelenggaraan Pengawasan/ Penyuluhan dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Komponen kegiatan ini mencakup penyelenggaraan pertemuan secara internal. - Kaji Ulang Manajemen Pengawasan/ Penyuluhan Kemetrolagian. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh daerah untuk mengevaluasi kesesuaian penyelenggaraan Pengawasan/ Penyuluhan Kemetrologi dengan persyaratan yang telah ditetapkan secara keseluruhan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Komponen kegiatan ini mencakup penyelenggaraan pertemuan secara internal dan/ atau eksternal. - Dukungan Surveillance sebagai Asesi. Kegiatan ini merupakan kegiatan dukungan dari daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan surveillance yang dilakukan oleh Direktorat Metrologi dalam memastikan konsistensi penyelenggaraan	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			pengawasan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Komponen kegiatan ini mencakup penyelenggaraan pertemuan secara internal dan/ atau eksternal. - Pelatihan Fungsional Pengawasan Kemetrolagian. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengembangkan kompetensi dan kemampuan SDM melalui keikutsertaan dalam pelatihan fungsional Pengawas Kemetrolagian dan/ atau pengamat tera yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolagian. Komponen kegiatan mencakup perjalanan dinas bagi peserta pelatihan dan/ atau penyediaan biaya pelatihan. - Pelatihan Teknis Pengawas Kemetrolagian. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengembangkan kompetensi dan kemampuan SDM melalui keikutsertaan dalam pelatihan teknis Pengawas Kemetrolagian dan/ atau pengamat tera yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan. Komponen kegiatan mencakup perjalanan dinas bagi peserta pelatihan, pemanggilan tenaga pengajar dari luar dan/ atau penyediaan biaya pelatihan.	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			- Pelaksanaan Uji Kompetensi. Kegiatan ini merupakan kegiatan terkait penilaian kemampuan/ kompetensi Pengawas Kemetrolagian dan/ atau pengamat tera yang dilakukan secara berkala oleh Direktorat Metrologi. Komponen kegiatan mencakup perjalanan dinas bagi peserta pelatihan dan/ atau penyediaan biaya uji kompetensi. - Penilaian Angka Kredit Pengawas Kemetrolagian. Kegiatan ini merupakan kegiatan penilaian angka kredit bagi Pengawas Kemetrolagian dan/ atau pengamat tera. Komponen kegiatan ini mencakup penyampaian berkas PAK dan perjalanan dinas dalam hal kebutuhan penilaian bagi jenjang tertentu. - Pelaksanaan Magang, Coaching, Bimtek ke BSML / Ditmet. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengembangkan komptensi dan kemampuan SDM UML melalui keikutsertaan dalam Magang, Coaching, Bimtek yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan penawaran yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Metrologi. Komponen kegiatan ini mencakup perjalanan dinas bagi peserta. - Pelatihan Manajemen Operasional Kemetrolagian. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			mengembangkan kompetensi dan kemampuan SDM UML melalui keikutsertaan dalam Pelatihan Manajemen Operasional Kemetrolagian yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan. Komponen kegiatan mencakup perjalanan dinas bagi peserta pelatihan dan/ atau penyediaan biaya pelatihan. - Harmonisasi Kegiatan Metrolgi Legal Regional. Kegiatan ini merupakan kegiatan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh UML di regional masing-masing dalam rangka mengharmonisasikan penyelenggaraan kegiatan kemetrolagian. Komponen kegiatan ini mencakup perjalanan dinas bagi peserta. - Forum Pengawasan Kemetrolagian Nasional. Kegiatan ini merupakan kegiatan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh UML secara nasional dalam rangka pembahasan dan uji publik prosedur teknis dan rancangan NSPK di bidang metrologi legal yang akan diterapkan maupun yang sudah diterbitkan sehigga NSPK di bidang metrologi legal dapat diimplementasikan dengan baik. Komponen kegiatan ini mencakup perjalanan dinas bagi peserta. - Sistem Informasi Pengawasan Kemetrolagian. Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka memanfaatkan sistem informasi terkait	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			layanan tera dan tera ulang yang dibangun oleh Kementerian Perdagangan, seperti pelaporan pemantauan dan pengawasan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang Dan Alat Perlengkapan dan BDKT - Penanganan Pengaduan / Laporan Masyarakat. Kegiatan ini merupakan kegiatan tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang metrologi legal. - Penyelidikan (Pengumpulan Bahan Keterangan)/ Wasmatlitrik. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengumpulkan bahan keterangan tindak lanjut hasil pengawasan yang akan diteruskan ke tahap penyidikan. - Expose hasil pengawasan kemetrologian. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat dan wajib tera terkait dengan hasil pengawasan. Kegiatan ini bisa berupa sosialisasi tatap muka, webinar, pembuatan video publikasi di radio, TV, media elektronik, media cetak, dan lain-lain	
15	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Industri Dokumen Rencana Pembangunan	Kinerja pada subkegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota adalah jumlah dokumen perencanaan industri yang dihasilkan oleh OPD yang membidangi perindustrian dalam bentuk Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri tahun n
16	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan	Kinerja pada subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi industri,

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
	Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Perwilayahan Industri adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri selama 1 tahun. Pelaksanaan Kebijakan perwilayahan dimaksud dapat berupa: 1) Wilayah pusat pertumbuhan industri, 2) Kawasan peruntukan industri, 3) Kawasan industri	sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan tahun n
17	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	- Pembangunan SDM industri dapat dilakukan melalui: a) Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi; b) Menyelenggarakan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi; c) Memfasilitasi pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Industri; d) Memberikan insentif bagi Perusahaan Industri dan/ atau Perusahaan Kawasan Industri yang menerima Pemagangan Industri; e) Memfasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri; f) Pelaksanaan Diklat Teknis Industri untuk ASN daerah - Pemanfaatan Sumber daya alam industri dapat dilakukan melalui: a) Penyediaan sumber daya alam untuk industri di daerah; b) Penyaluran sumber daya alam untuk industri di daerah; c) Fasilitasi ketersediaan Sumber Daya Alam terbarukan	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri tahun n

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			dan Sumber Daya Alam tidak terbarukan melalui pemetaan dan penetapan wilayah Penyediaan Sumber Daya Alam terbarukan, konservasi Sumber Daya Alam dan/ atau penanganan budi daya dan pasca panen Sumber Daya Alam terbarukan; d) Penyediaan informasi potensi sumber daya alam di daerah guna penyusunan rencana Penyediaan dan Penyaluran sumber daya alam; e) Fasilitasi kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong dengan menjamin ketersediaan dari dalam negeri atau luar negeri bagi Perusahaan Industri serta penyaluran Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong di daerah 3. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dilakukan melalui: a) Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri; b) Fasilitasi kerja sama dalam peningkatan penguasaan, pemanfaatan, dan penerapan teknologi industri 4. Pengembangan dan Pemanfaatan kreativitas dan inovasi dapat dilakukan melalui: a) Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkegiatan dan berinovasi; b) Pengembangan sentra Industri kreatif; c) Pelatihan teknologi dan desain; d) Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; e) Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri; f) Fasilitasi pengembangan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) untuk meningkatkan produktivitas masyarakat pedesaan melalui pelaksanaan Pilot Project pemanfaatan aplikasi AMMDes untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi pedesaan serta sosialisasi program pemanfaatan AMMDes guna penyebaran informasi, membangun awareness, mendorong penerimaan dan pemanfaatan AMMDes untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di desa; g) Fasilitasi pembangunan dan pengembangan Virtual Technopark (Software, Aplikasi dan Game) melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia untuk mendukung pengembangan Virtual Technopark, penyiapan sarana dan prasarana Virtual Technopark dan sosialisasi program Virtual Technopark guna penyebaran informasi, dan membangun awareness. Pemanfaatan kreativitas dan inovasi tersebut dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Pembiayaan yang berasal dari Pemerintah	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			Daerah sebagaimana dimaksud hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Industri yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, dalam bentuk: a) pemberian pinjaman; b) hibah; dan/ atau c) penyertaan modal	
18	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kinerja dari subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri diukur dari jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Pelaksanaan Sub Kegiatan meliputi: 1. Standardisasi industri: a) Pembinaan dalam penerapan SNI secara sukarela atau pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/ atau Pedoman Tata Sara secara wajib terhadap Perusahaan Industri dan masyarakat; b) Penyediaan, peningkatan, dan pengembangan Sarana dan Prasarana laboratorium pengujian standar industri pada wilayah pusat pertumbuhan Industri 2. Dalam rangka pemberian fasilitas nonfiskal untuk perusahaan industri skala besar atau perusahaan kawasan industri yang lokasinya di daerah kabupaten/ kota: a) Merumuskan rencana pemberian fasilitas; b) Realisasi pemberian fasilitas; c) Pembinaan pemanfaatan fasilitas nonfiskal dalam kegiatan industri atau	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri tahun n

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			kawasan d. Evaluasi pemanfaatan fasilitas 3. Fasilitas industri bagi perusahaan industri yang mengutamakan penggunaan produk industri kecil sebagai komponen dalam proses produksi. Fasilitas industri tersebut dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku.	
19	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kinerja subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah serta Peran Serta Masyarakat diukur dari jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah serta Peran Serta Masyarakat dalam 1 tahun. Pemberdayaan industri yang dapat dilakukan oleh Pemda khususnya terkait IKM. Pemberdayaan IKM yang dapat dilakukan Pemda sesuai PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan IKM adalah penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas. Pelaksanaan Sub Kegiatan meliputi: 1. Pelaksanaan urusan peningkatan kompetensi internal IKM sebagai berikut: a) Penerapan e-business dalam rangka digitalisasi IKM melalui (Pelatihan dan pendampingan IKM dalam penggunaan e – business); dan/ atau b) Kompetisi start-up IKM dalam rangka meningkatkan aktivitas pengembangan produk IKM digital berbasis teknologi yang hasilnya	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat tahun n

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			dapat dimanfaatkan kepada industri maupun sektor lainnya 2. Pelaksanaan urusan penguatan kapasitas kelembagaan IKM sebagai berikut: a)Peningkatan Kemampuan Sentra IKM dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: (i) membangun atau merevitalisasi sentra IKM berdasarkan kebutuhan perioritas IKM; (ii) memfasilitasi pembentukan kepengurusan sentra IKM; (iii) meningkatkan kemampuan kegiatan usahamelalui Revitalisasi sentra IKM; (iv) mendirikan Unit Pelayanan Teknis berdasarkan kebutuhan prioritas IKM; (v) pengembangan sentra industri kreatif; b) Peningkatan Kemampuan Unit Pelayanan Teknis IKM (UPT IKM) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: (i) optimalisasi dan/ atau restrukturisasi mesin/ peralatan; (ii) pengembangan organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Teknis; (iii) peningkatan SDM (pengelola maupun operatornya); dan/ atau (iv) perluasan jejaring kerja (dapat bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Litbang, maupun Lembaga terkait lainnya); c) Pemberdayaan Tenaga Penyuluh (PFPP, TPL IKM) dapat	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: (i) pendidikan dan pelatihan untuk upskilling Tenaga Penyuluh (PFPP, TPL IKM) agar dapat melakukan pembinaan lebih baik kepada IKM; (ii) magang untuk menambah kemampuan teknis Tenaga Penyuluh (PFPP, TPL IKM) agar dapat melakukan pembinaan lebih baik kepada IKM; dan/ atau (iii) sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Penyuluh (PFPP, TPL IKM) agar dapat melakukan pembinaan lebih baik kepada IKM; d) Kerjasama - kerjasama dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: (i) Lembaga Pendidikan (Diklat, pendirian incubator wirausaha industri, survey dan riset pasar, dan/ atau pemanfaatan hasil riset); (ii) Lembaga Litbang (identifikasi masalah teknis dan manajerial, identifikasi kebutuhan mesin dan peralatan, pengembangan desain dan produk, pemanfaatan laboratorium, survey dan riset pasar, pemanfaatan hasil riset, dan/ atau sertifikasi kompetensi); (iii) Asosiasi Industri (pengembangan pasar produk sentra IKM, alih teknologi kepada IKM dan Unit Pelayanan Teknis, pengembangan	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			SDM, Pemagangan, Pendampingan ke sentra IKM dan Unit Pelayanan Teknis, dan/ atau pembukaan akses ke sumber bahan baku bagi sentra IKM); dan/ atau (iv) Asosiasi Profesi Terkait (pengalihan teknologi kepada sentra IKM dan Unit Pelayanan Teknis, pengembangan SDM, survey dan riset, dan/ atau pendampingan ke sentra IKM atau Unit Pelayanan Teknis) 3. Pelaksanaan urusan Pemberian Fasilitas Kepada Industri Kecil dan Menengah sebagai berikut: a) Peningkatan kompetensi SDM dan sertifikasi kompetensi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: (i) kompetensi SDM (pendidikan dan pelatihan teknis maupun manajerial); dan/ atau (ii) sertifikasi kompetensi pelaku usaha dan/ atau tenaga kerja IKM (uji kompetensi sesuai dengan bidang kerja dan tugasnya); b) Pemberian bantuan dan bimbingan teknis dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: (i) Pemagangan berupa (manajemen usaha, penguasaan teknologi, proses produksi dan tata letak mesin/ peralatan, sistem mutu dan standar mutu, desain produk, dan/ atau desain kemasan) bagi pelaku usaha dan/ atau tenaga kerja IKM di Unit Pelayanan Teknis dan/	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			atau perusahaan industri yang lebih maju; dan/ atau (ii) Pendampingan oleh Tenaga Ahli, TPL, dan/ atau Konsultan IKM (Penyuluh) pada unit usaha IKM dan/ atau sentra IKM berupa (manajemen usaha, penguasaan teknologi, proses produksi dan tata letak mesin/ peralatan, sistem mutu dan standar mutu, desain produk, desain kemasan, dan/ atau HKI) kepada IKM; c) Pemberian bantuan bahan baku dan bahan penolong dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: (i) skema penyediaan bahan baku dan bahan penolong yang merupakan hasil kerjasama penyediaan bahan baku antara Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah dengan penyediaan bahan baku dan IKM; (ii) mendirikan dan mengelola unit pelayanan bahan baku dan bahan penolong yang lokasinya memperhatikan potensi sentra IKM dan rencana pengembangannya oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah. Unit tersebut dapat melakukan pengolahan awal guna penyiapan bahan baku; (iii) pengenalan bahan baku dan bahan penolong alternatif yang bersumber dari hasil penelitian yang telah teruji dengan menggunakan sumber daya lokal dan nasional dan diuji coba di	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			perusahaan IKM; dan/ atau (iv) bantuan bahan baku dan bahan penolong yang diberikan secara langsung kepada Industri Kecil yang menghadapi hambatan dan permasalahan jumlah, kualitas atau kesinambungan dalam pengadaan bahan baku dan bahan penolong; d)Pemberian bantuan mesin atau peralatan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: (i) pemberian bantuan mesin atau peralatan secara langsung kepada kelompok usaha bersama Industri Kecil yang masih menggunakan peralatan tradisional/ manual yang telah diverifikasi dalam rangka meningkatkan produktivitas, mutu, dan/ atau ragam produk; dan/ atau (ii) potongan harga pembelian mesin atau peralatan yang telah diverifikasi yang diberikan pada tahun berjalan atau tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan produktivitas, mutu, dan/ atau ragam produk; e) Pemberian bantuan pengembangan produk IKM dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: (i) bantuan penelitian dan pengembangan produk IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya; (ii) promosi alih teknologi IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya; (iii) bantuan desain produk IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya; (iv) bantuan desain kemasan IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya; (v) pembuatan purwarupa (prototype) produk IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya; (vi) uji coba pasar IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya; (vii) pemberian konsultasi, bimbingan, advokasi, dan perlindungan HKI IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya; dan/ atau (viii) bantuan bimbingan dan fasilitasi sertifikasi untuk SNI, spesifikasi teknis dan/ atau pedoman tata cara, dan standar mutu lainnya bagi IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya; (ix) Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Industri Kecil dan Menengah di level Kabupaten/ Kota; (x) Fasilitasi Sertifikasi TKDN Bagi Industri Kecil dan Menengah di	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			level Kabupaten/ Kota; f) Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: (i) bantuan penyusunan upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup, dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, konsultan lingkungan hidup, atau tenaga ahli lainnya yang mempunyai kompetensi dalam penerapan produksi ramah lingkungan hidup atau Industri Hijau; (ii) bimbingan dan penyediaan informasi penerapan produksi ramah lingkungan hidup bagi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, konsultan lingkungan hidup, atau tenaga ahli lainnya yang mempunyai kompetensi dalam penerapan produksi ramah lingkungan hidup atau Industri Hijau; (iii) penyelenggaraan pengelolaan air limbah bersama bagi IKM yang	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; dan/ atau (iv) sertifikasi industri hijau bagi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup; g) Pemberian bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: (i) penyediaan data dan/ atau informasi peluang pasar bagi IKM; (ii) penyediaan sarana promosi dan keikutsertaan dalam pameran serta forum promosi lainnya yang dapat diprioritaskan bagi IKM yang telah memiliki atribut produk (standadisasi dan HKI) dan dapat dipasarkan secara luas/ tidak hanya skala lokal; (iii) temu usaha bagi IKM dalam rangka penguatan informasi pasar, promosi dan pemasaran; dan/ atau (iv) kompetisi produk inovatif dan kreatif bagi IKM yang telah memiliki atribut produk lengkap (standadisasi dan HKI) dan dapat dipasarkan secara luas/ tidak hanya skala lokal; h) Pemberian bantuan akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			melalui: (i) penyediaan informasi skema pembiayaan bagi IKM; (ii) penyusunan studi kelayakan usaha bagi IKM; dan/ atau (iii) mengusahakan penyediaan modal awal untuk memberikan kesempatan memulai kegiatan usaha baik dapat berupa investasi (mesin, peralatan, dan/ atau teknologi produksi termasuk perangkat lunak) maupun berupa modal kerja (bahan baku, bahan penolong, dan/ atau sewa tempat usaha paling lama 3 (tiga) tahun bagi wirausaha baru industri kecil yang harus mengajukan permohonan dengan melampirkan rencana usaha; i) Penyediaan/ penguatan Sentra IKM untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: (i) relokasi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dalam kawasan industri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; dan/ atau (ii) pembangunan kawasan/ sentra untuk IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup; j) Pemberian fasilitas pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar, industri menengah dengan	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			industri besar, serta industri kecil dan menengah dengan industri besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: (i) kegiatan temu usaha bagi IKM untuk bermitra, baik antara industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar, industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan menengah dengan industri besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya; (ii) bantuan penyusunan proposal, kotrak, dan/ atau profil bagi IKM dalam rangka kemitraan baik antara industri kecil dengan menengah, industri kecil dengan industri besar, industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan menengah dengan industri besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya; dan/ atau (iii) fasilitas lain bagi IKM yang diperlukan guna menjalin hubungan kemitraan antara industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar, industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan menengah dengan industri besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya; k) Dukungan anggaran pembiayaan perencanaan, monitor dan evaluasi, data dan informasi, serta pembinaan lanjutan	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: (i) dukungan anggaran pembiayaan perencanaan baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM oleh Pemerintah Daerah; (ii) dukungan anggaran pembiayaan monitor dan evaluasi baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM oleh Pemerintah Daerah; (iii) dukungan anggaran pembiayaan data dan informasi baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM oleh Pemerintah Daerah; dan(iv) dukungan anggaran pembiayaan pembinaan lanjutan baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM oleh Pemerintah Daerah; l) Fasilitas non fiskal bagi industri kecil dan industri menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis, dan/ atau pedoman tata cara yang diberlakukan	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			secara wajib dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku.	
20	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kinerja dari sub kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri diukur dari indikator jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri dalam 1 tahun. Dalam NSPK dokumen evaluasi tersebut adalah: 1) Bupati/ Walikota melaporkan hasil pelaksanaan RPIK kepada Gubernur paling banyak 2 kali dalam 1 tahun; dan 2) Peninjauan kembali RPIK dalam 5 tahun	Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri tahun n
21	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/ Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi atau Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Kinerja sub kegiatan pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/ Kota diukur dari jumlah objek yang diawasi dan jumlah program pengawasan jaminan produk halal yang bisa diimplementasikan dalam 1 tahun.	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi atau Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan tahun n
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Industri Dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah Yang Berlokasi di Satu Kabupaten/ Kota Sepanjang Merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Selain Bidang Usaha Tertentu Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	Kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Berusaha industri kewenangan Kabupaten/ Kota diukur dari jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan berusaha di Bidang Industri Dalam Lingkup perizinan berusaha industri kewenangan Kabupaten/ Kota dalam 1 tahun. Dokumen harus memuat informasi sebagai berikut: 1) Rekapitulasi perizinan berusaha industri kewenangan Kabupaten/ Kota yang diterbitkan dalam 1 tahun sebelum tahun; 2) Daftar Inventaris peraturan sektoral berlaku dan persyaratan dan/ atau	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan tahun n

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			kewajiban perizinan berusaha sektor perindustrian, untuk setiap bidang usaha yang terdapat dalam perizinan berusaha industri kewenangan Kabupaten/ Kota yang telah terekapitulasi dalam 1 tahun sebelum tahun; 3) Daftar rencana pengawasan industri untuk 1 tahun sebelum tahun berjalan yang paling sedikit memuat objek pengawasan, lingkup pengawasan, jadwal pengawasan, keanggotaan tim pengawasan yang dilakukan melalui sistem e-wasdal dalam; 4) Rekapitulasi realisasi pengawasan terhadap rencana pengawasan industri; 5) Laporan hasil kegiatan pengawasan yang paling sedikit memuat waktu dan lokasi pelaksanaan identitas Perusahaan uraian Perizinan rekomendasi hasil rencana tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang disusun oleh Perusahaan dan Berita Acara Pelaksanaan Pengawasan dalam 1 tahun sebelum tahun; 6) Laporan evaluasi pemenuhan dan kepatuhan perusahaan industri terhadap peraturan di bidang perindustrian khususnya lingkup perizinan berusaha diantaranya memuat rekapitulasi jumlah perusahaan yang telah dilakukan pengawasan berdasarkan tingkat; 7) Laporan tindak lanjut evaluasi pemenuhan dan kepatuhan perusahaan industri terhadap peraturan di bidang perindustrian khususnya lingkup perizinan berusaha kewenangan Kabupaten/ Kota dalam 1 tahun sebelum tahun berjalan,	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			melalui kegiatan pengendalian perizinan berusaha bidang industri berupa fasilitasi, pembinaan dan/ atau pemberian sanksi menurut kewenangan Kabupaten/ Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	
23	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas) Yang Terintegrasi Dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Bidang Usaha Sektor Perindustrian Dengan Tingkat Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas Yang Terintegrasi Dengan Sistem OSS RBA, Bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, Selain Bidang Usaha Tertentu Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	Kinerja sub kegiatan fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dokumen Laporan Kinerja Sub Kegiatan verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut: 1) Rekapitulasi jumlah notifikasi permintaan verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian untuk bidang usaha dengan tingkat risiko Menengah-Tinggi dan Tinggi yang diterima melalui Hak Akses OSS maupun yang diterima melalui Akun; 2) Rekapitulasi jumlah hasil verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian untuk bidang usaha dengan tingkat risiko Menengah-Tinggi dan	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian tahun n

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			Tinggi, berupa penolakan, pengembalian, atau persetujuan melalui Hak Akses OSS, maupun berupa pengembalian dan persetujuan pemenuhan di; 3) Laporan verifikasi dari seluruh perusahaan industri yang telah mengajukan permintaan verifikasi dan telah dilakukan verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian untuk bidang usaha dengan tingkat risiko Menengah-Tinggi dan Tinggi yang diterbitkan oleh; 4) Rekapitulasi jumlah laporan verifikasi yang diperoleh pelaku usaha dari SIINas, dan telah dilakukan pengunggahan sebagai dokumen pemenuhan persyaratan usaha di Sistem OSS RBA oleh pelaku; 5) Rekapitulasi perbandingan jumlah perusahaan industri yang telah memperoleh dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian melalui SIINas, dengan perusahaan yang memperoleh perizinan berusaha berbasis risiko sebagai legalitas usaha melalui OSS RBA	
24	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kinerja Sub kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) diukur dari jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari fasilitasi data industri tahun n

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dalam 1 tahun. Dokumen tersebut harus berisi : 1) Data industri beserta pengolahan dan analisisnya 2) Data kawasan industri beserta pengolahan dan analisisnya 3) Data lain lingkup Kabupaten/ Kota beserta pengolahan dan analisisnya. Pelaksanaan Sub Kegiatan dimaksud meliputi: 1) Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di lingkup Kabupaten/ Kota dapat dilakukan antara lain dengan : a) Kegiatan Tatap Muka (meeting) menghadirkan Narasumber, b) Melalui media cetak, media elektronik, secara virtual ataupun media sosial, c) Melalui penyediaan layanan konsultasi baik fisik (gerai/ ruangan khusus) ataupun elektronik (live chat dst); 2) Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lain terkait Sektor Industri lingkup Kabupaten/ Kota dapat dilaksanakan antara lain dengan: a) Kegiatan FGD, rapat, seminar, konsinyering dst melibatkan instansi penyedia data, b) Penyusunan Nota Kesepahaman dan/ atau Perjanjian Kerjasama Tukar Menukar data dengan instansi penyedia data, c) Pelaksanaan survey baik melalui swakelola ataupun pihak ketiga; 3) Penyediaan Informasi dan Analisa Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dapat dilaksanakan antara lain dengan: a) Swakelola melalui FGD, Rapat,	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			Seminar, Konsinyering, dll melibatkan narasumber tenaga ahli baik praktisi maupun, dan/ atau b) Pihak Ketiga, contohnya melalui Jasa Konsultansi dengan Tenaga Ahli Pengolahan	
25	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas	Kinerja sub kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas diukur dari jumlah dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas dalam 1 tahun . Dokumen harus berisi laporan jumlah data, informasi dan analisis industri yang telah masuk dalam SIINAS selama 1 tahun Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas dapat berupa penyusunan Dashboard Sistem Informasi Eksekutif (Executive Information System), Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) dan bentuk publikasi dan diseminasi lainnya. Penyusunan Diseminasi dan Publikasi ini dapat dikerjakan secara swakelola maupun pihak ketiga.	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari diseminasi dan publikasi data industri tahun n
26	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kinerja sub kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas diukur dari jumlah dokumen hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas. Dokumen harus	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			memuat informasi jumlah perusahaan industri yang dikenai sanksi administratif berupa : 1) peringatan tertulis; 2) denda administratif ; 3) penutupan sementara; 4) pembekuan izin usaha industri atau izin usaha kawasan industri; 5) pencabutan izin usaha industri atau izin usaha kawasan industri. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri lingkup Kabupaten/ Kota dapat dilaksanakan antara lain dengan: 1) Rapat Koordinasi antara Dinas yang membidangi Perindustrian di Kabupaten/ Kota dengan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya; 2) Kunjungan (Site Visit) ke Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya yang belum patuh dalam penyampaian Data di SIINas	
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya laporan koordinasi dan sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat dengan alat ukur laporan koordinasi dan sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat dengan satuan laporan	Jumlah laporan yang dihasilkan dari koordinasi dan sinkronisasi tahun n
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat dengan alat ukur laporan Koordinasi dan	Jumlah laporan yang dihasilkan dari koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas tahun n

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat dengan satuan laporan	
29	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya laporan pengendalian stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat dengan alat ukur laporan pengendalian stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat dengan satuan laporan	Jumlah laporan yang dihasilkan dari pengendalian stok atau ketersediaan Bapokting tahun n
30	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota dengan alat ukur Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota dengan satuan laporan	Jumlah laporan yang dihasilkan dari pemantauan harga dan stok tahun n
31	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tersedianya laporan pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dengan alat ukur laporan pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dengan satuan laporan	Jumlah laporan yang dihasilkan dari pemantauan harga dan stok pada pasar rakyat tahun n
32	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Tersedianya laporan pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota dengan alat ukur laporan pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1	Jumlah laporan yang dihasilkan dari pelaksanaan operasi pasar tahun n

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			(satu) Kabupaten/ Kota dengan satuan laporan	
33	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah Tersedianya laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% dengan alat ukur laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% dengan satuan laporan	Jumlah laporan yang dihasilkan dari pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi tahun n
34	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun sebagai bagian dari kegiatan perencanaan oleh perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah tahun n
35	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang dihasilkan sebagai hasil dari kegiatan evaluasi kinerja oleh perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang dihasilkan oleh perangkat daerah tahun n
36	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah individu yang menerima gaji dan tunjangan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)	Jumlah individu yang menerima gaji dan tunjangan sebagai ASN tahun n
37	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang terkait dengan kegiatan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Jumlah dokumen yang terkait dengan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan oleh SKPD tahun n
38	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket komponen yang disediakan untuk instalasi listrik/ penerangan di bangunan kantor	Jumlah paket komponen yang disediakan untuk instalasi listrik/ penerangan di bangunan kantortahun n
39	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket yang berisi peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket yang berisi peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan tahun n

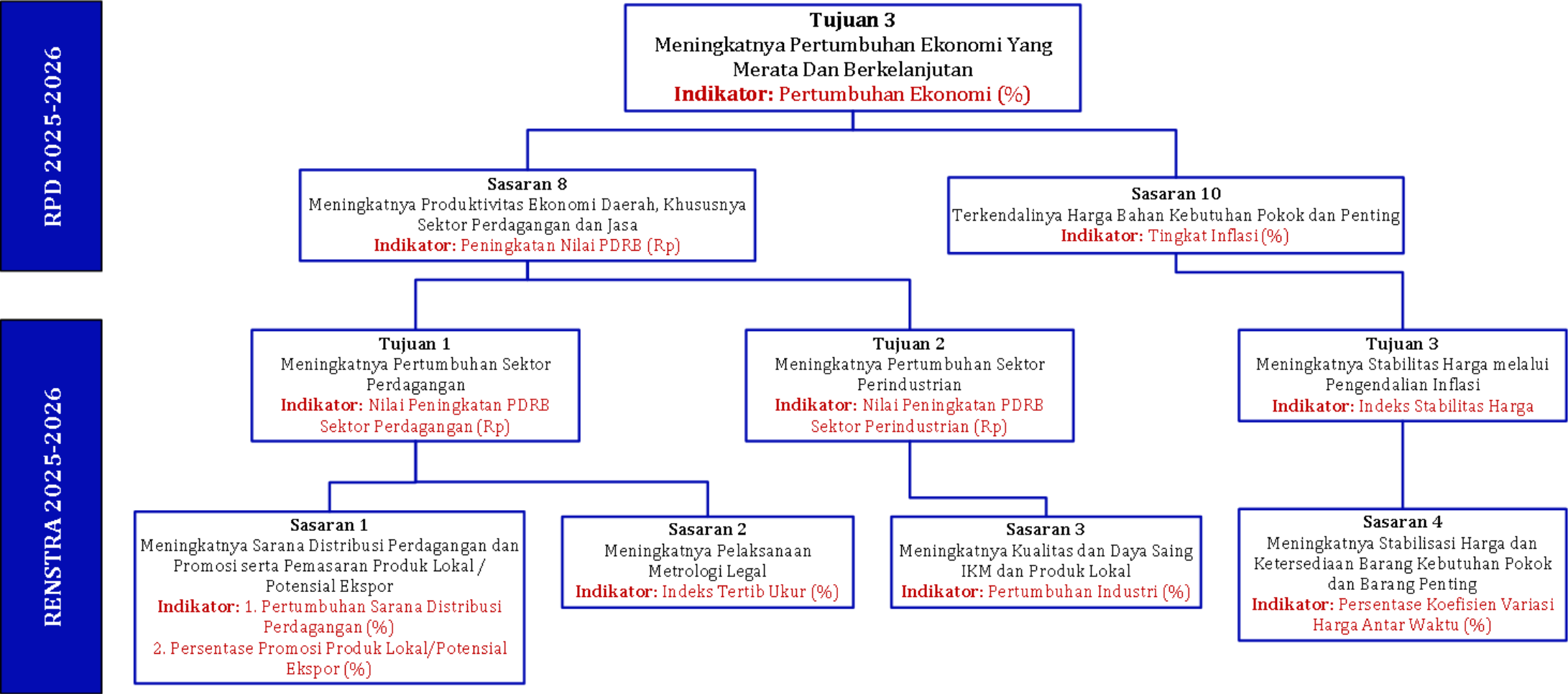
No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
40	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah paket yang berisi barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket yang berisi barang cetak dan penggandaan yang disediakan tahun n
41	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah dokumen yang berisi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen yang berisi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan tahun n
42	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan yang berisi hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tahun n
43	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen yang terkait dengan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen terkait penatausahaan arsip dinamis pada SKPD tahun n
44	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan yang mencakup penyediaan jasa surat menyurat di SKPD	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat di SKPD tahun n
45	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan yang mencakup penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik di SKPD	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik di SKPD tahun n
46	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan yang mencakup penyediaan jasa pelayanan umum kantor di SKPD	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor di SKPD tahun n
47	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan di SKPD	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan di SKPD tahun n
48	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan di SKPD	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan di SKPD tahun n
49	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara

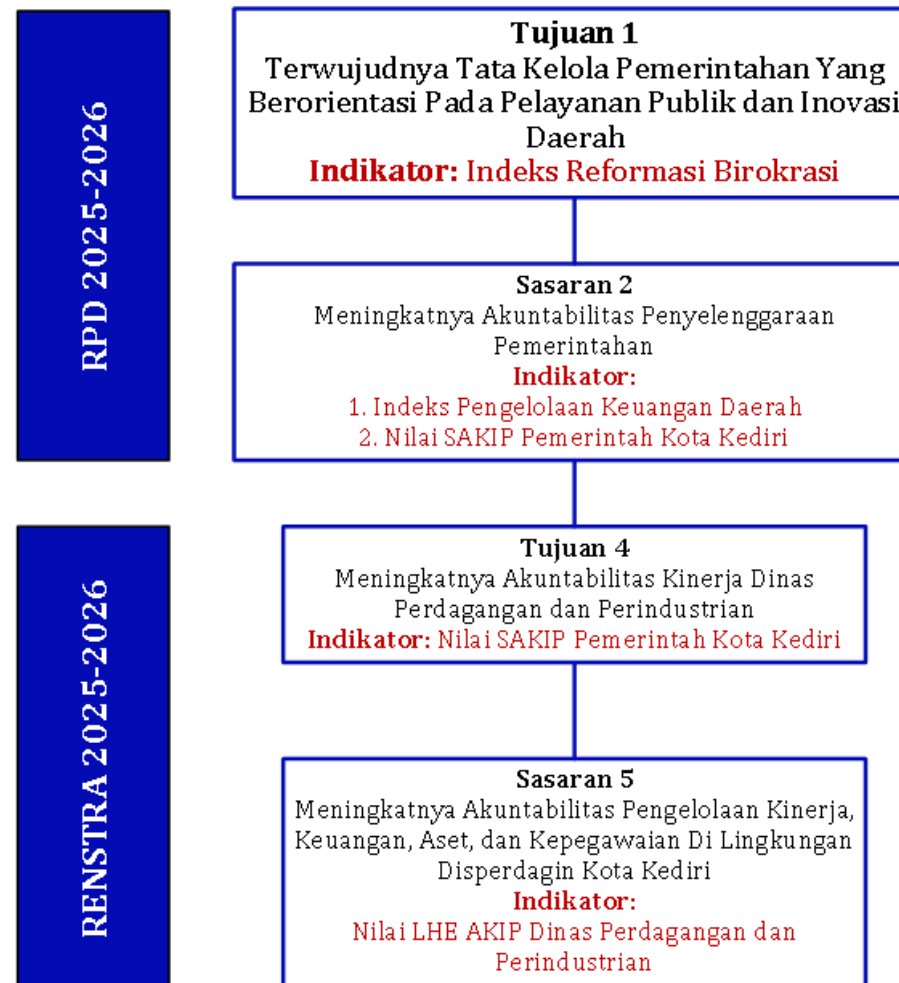
No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya	dibayarkan pajak serta perizinannya di SKPD	dan dibayarkan pajak serta perizinannya di SKPD tahun n
50	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara di SKPD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara di SKPD tahun n
51	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi di SKPD	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi di SKPD tahun n
52	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi di SKPD	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi di SKPD tahun n
53	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai di SKPD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing	Jumlah pegawai di SKPD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi tahun n
54	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan di SKPD	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan di SKPD tahun n
55	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di SKPD	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di SKPD tahun n

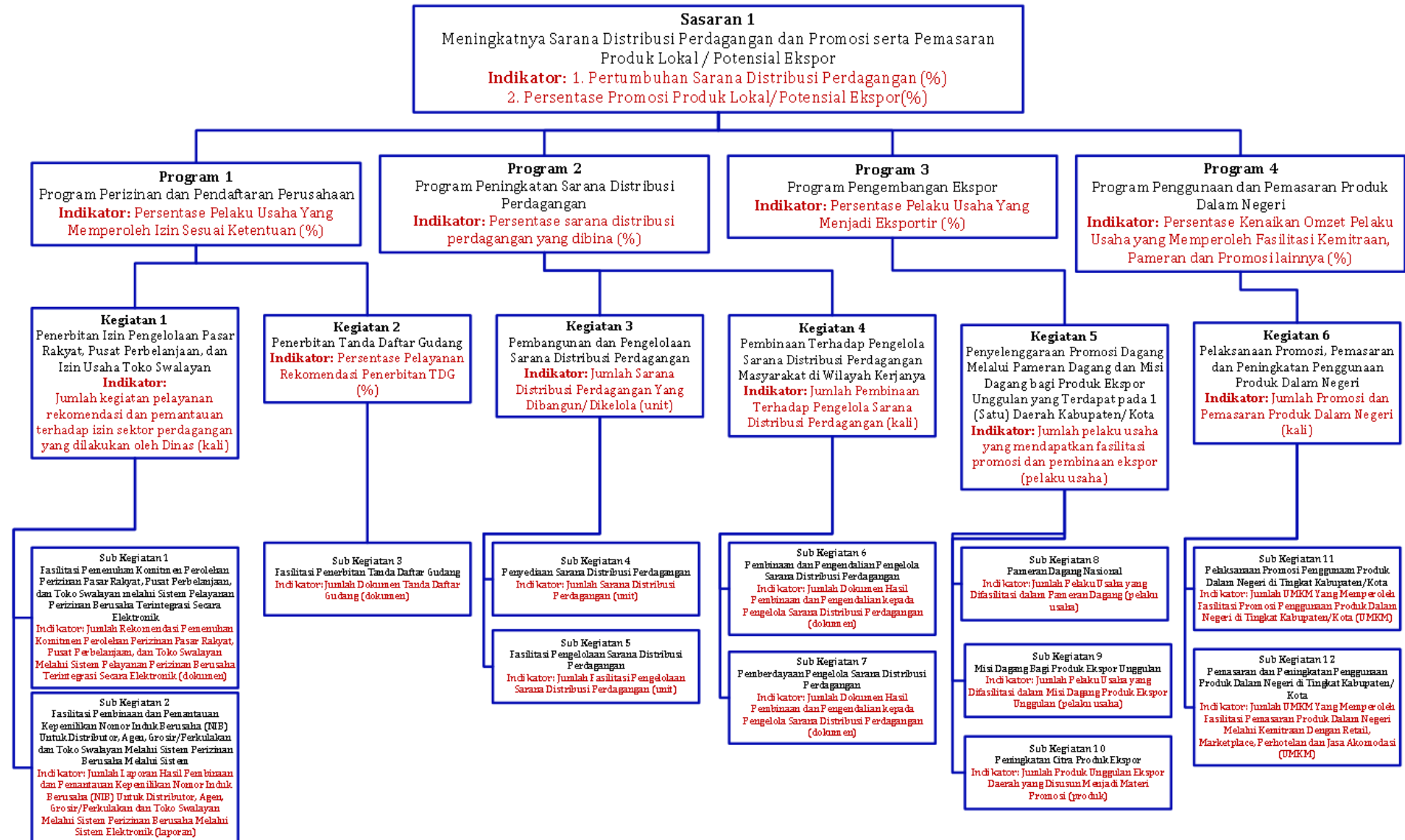
4.2. Cascading Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian

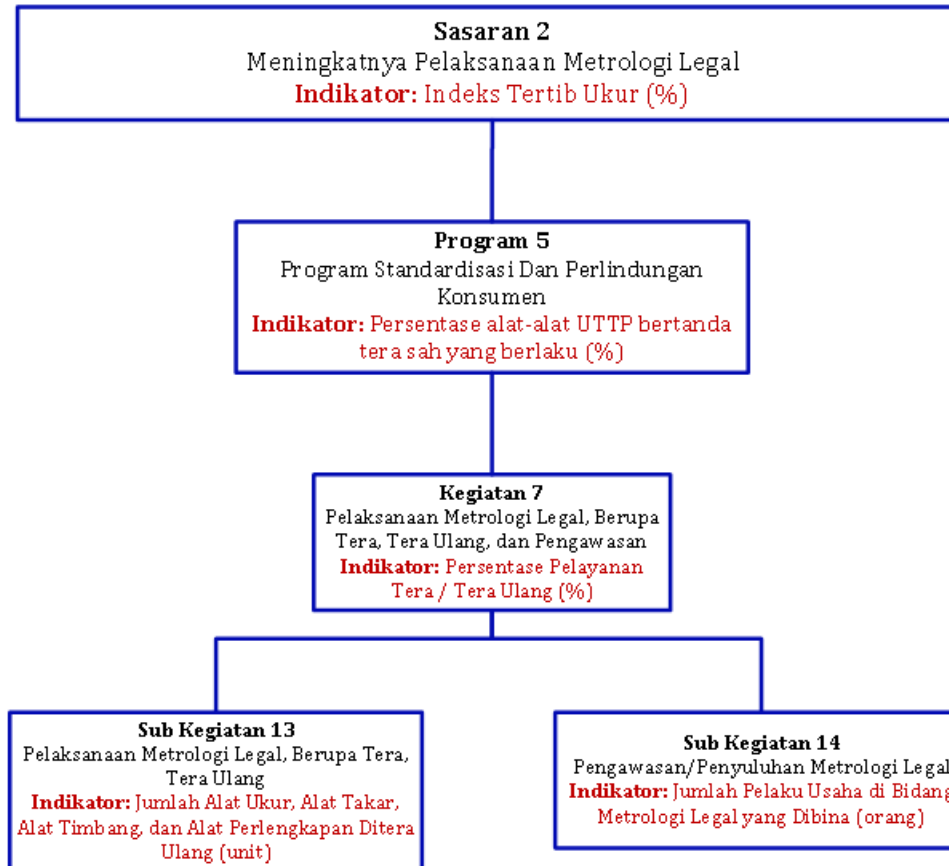
Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/ pegawai yang lebih tinggi ke level unit/ pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2025 – 2026 sebagaimana Bagan 4.1.

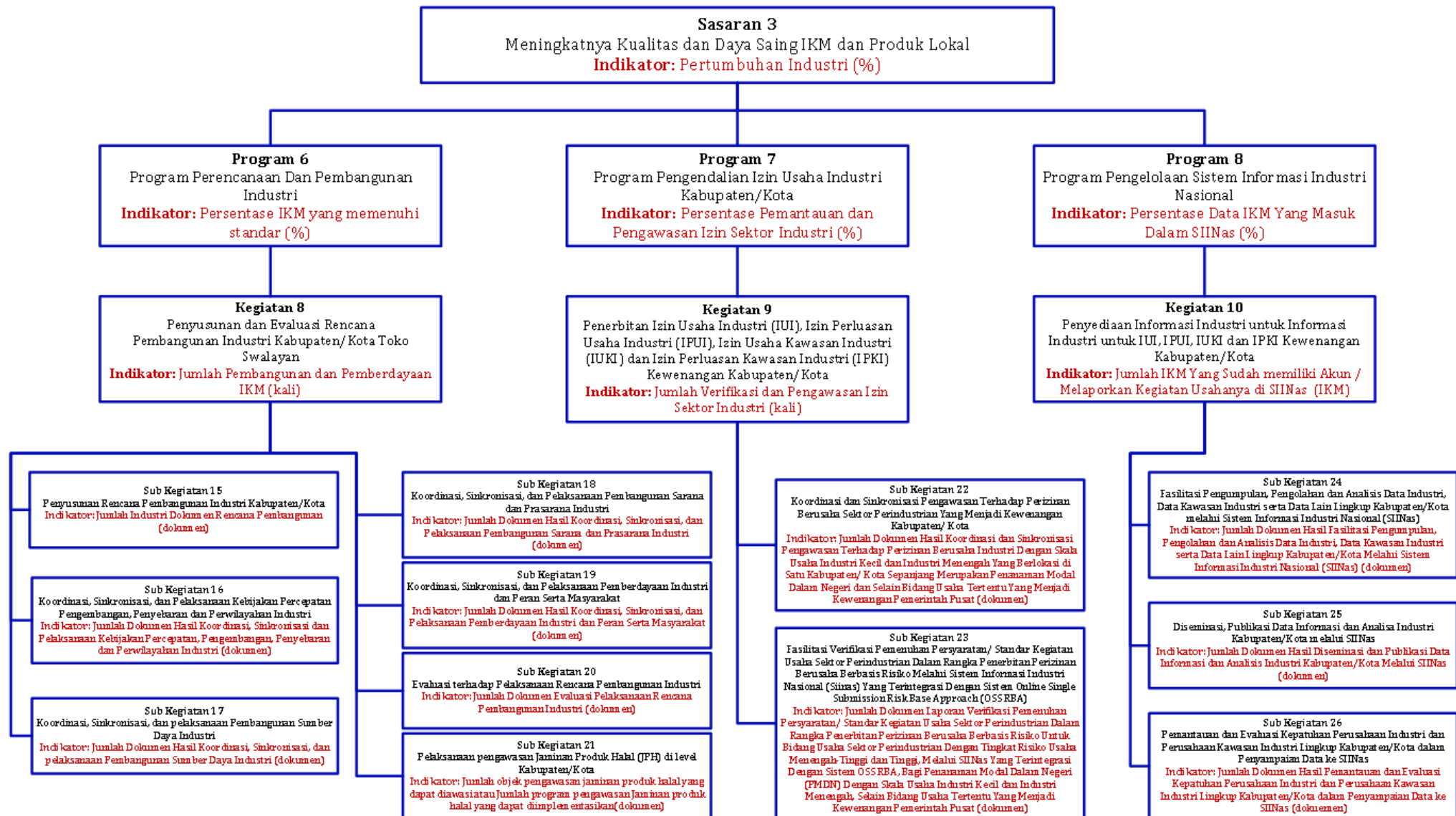
Bagan 4.1 Cascading Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

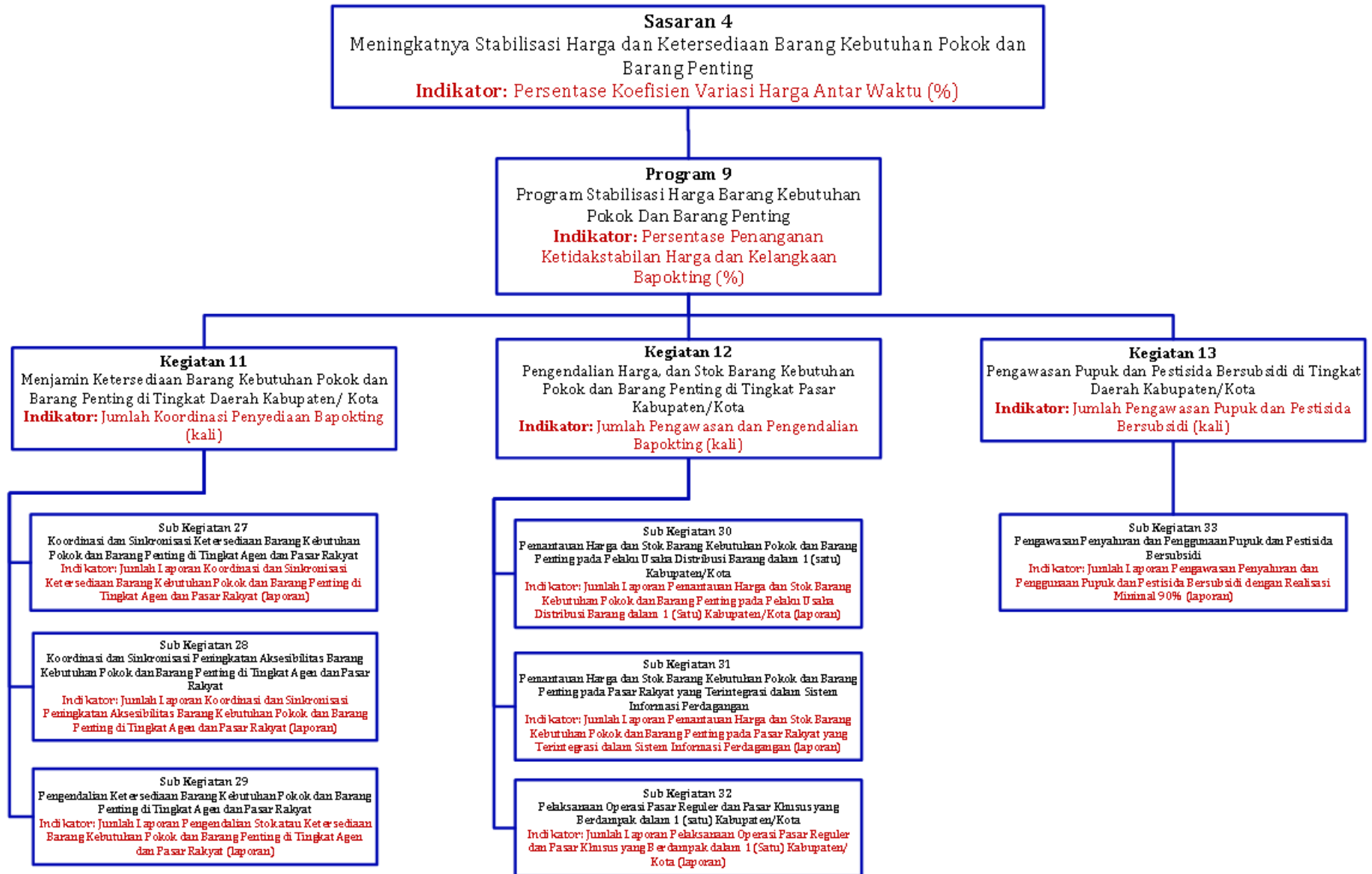


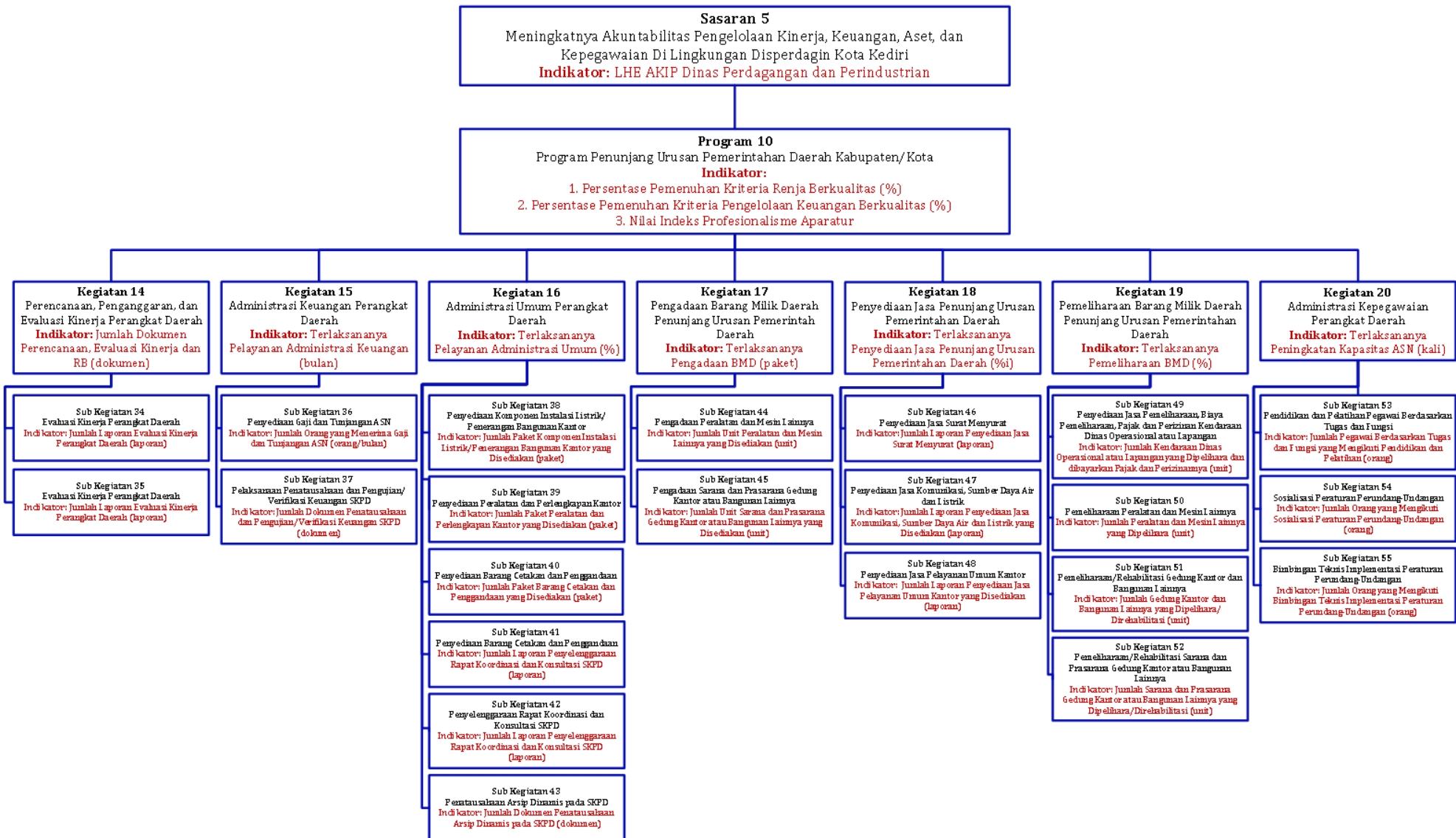












BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan adalah rumusan perencanaan yang komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Selain itu, strategi dan arah kebijakan juga merupakan respons terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan menjadi pedoman dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2025-2026 bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, sejalan dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk mengklarifikasi langkah-langkah dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar tetap sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan. Strategi diformulasikan berdasarkan analisis pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan tersebut, strategi yang dianggap realistis dapat dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut kemudian dijabarkan menjadi serangkaian arah kebijakan untuk menjadikannya lebih spesifik, konkret, dan operasional.

Pada bab sebelumnya, beberapa sasaran telah dirumuskan untuk dicapai dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2025-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat secara lengkap dalam tabel berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan dan Promosi serta Pemasaran Produk Lokal/ Potensial Ekspor	Peningkatan efisiensi dan kualitas sarana distribusi perdagangan, promosi, dan pemasaran produk lokal/ potensial ekspor, serta peningkatan pelaksanaan metrologi legal	Meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses perizinan perdagangan dan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha distribusi barang
				Meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan distribusi barang
				Mengoptimalkan infrastruktur distribusi untuk mendukung pertumbuhan sektor perdagangan
				Meningkatkan pangsa pasar ekspor bagi produk lokal
				Memperkuat kerjasama dengan instansi/ lembaga terkait untuk mendukung ekspansi ekspor
				Meningkatkan konsumsi produk dalam negeri melalui promosi dan kampanye serta edukasi

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya Pelaksanaan Metrologi Legal		Meningkatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang pentingnya metrologi legal bagi produsen dan konsumen
				Meningkatkan pelayanan metrologi legal
				Kolaborasi dengan instansi/ lembaga terkait standardisasi alat ukur
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing IKM dan Produk Lokal	Peningkatan kualitas dan daya saing Industri Kecil Menengah (IKM) serta produk lokal	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menyongsong dan merespon dinamika Revolusi Industri 4.0.
				Mendorong diversifikasi industri untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah
				Meningkatkan pembinaan dan pendampingan industri dalam pengembangan usaha
				Meningkatkan efektivitas pengendalian izin usaha industri
				Memfasilitasi akses yang mudah dan cepat terhadap informasi industri bagi pemangku kepentingan
				Mendorong penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan industri
3	Meningkatnya Stabilitas Harga melalui Pengendalian Inflasi	Meningkatnya Stabilitas Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Peningkatan stabilitas harga dan ketersediaan Bapokting melalui optimalisasi stok dan distribusi barang untuk merespons kebutuhan pasar dan mengendalikan inflasi	Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
				Meningkatkan efisiensi distribusi barang kebutuhan pokok untuk mencegah/ mengendalikan fluktuasi harga yang tajam
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Peningkatan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan, kualitas SDM dan sistem monitoring dan evaluasi	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja, keuangan dan aset
				Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi guna mencapai tujuan strategisnya, langkah operasionalnya perlu dijabarkan dalam program/ kegiatan/ subkegiatan, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri. Subkegiatan merupakan bentuk aktivitas di dalam kegiatan yang bertujuan menghasilkan keluaran (*output*) sesuai dengan pelaksanaan kewenangan daerah berdasarkan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau dalam kerjasama dengan masyarakat untuk mencapai sasaran tertentu.

Indikator kinerja merujuk pada ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Indikator ini secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang menggambarkan skala atau tingkatan. Indikator kinerja digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi kinerja *input*, *output*, *outcome*, dan *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan serta pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini:

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
			3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Dibangun/ Dikelola	Unit	N/ A	11	62.500.000	11	62.950.000	11	125.450.000
			3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	126	145	12.500.000	155	12.590.000	155	25.090.000
			3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	3	7	50.000.000	9	50.360.000	9	100.360.000
			3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kali	12	12	187.500.000	12	188.987.500	24	376.487.500
			3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	2	2	159.375.000	2	160.687.500	4	320.062.500
			3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	N/ A	1	28.125.000	1	28.300.000	2	56.425.000
		Persentase Promosi Produk Lokal/ Potensial Ekspor	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pelaku Usaha Yang Menjadi Eksportir	%	21,2	24	635.000.000	25	639.921.250	25	1.274.921.250
			3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Fasilitas Promosi Dan Pembinaan Ekspor	Pelaku Usaha	N/ A	50	635.000.000	50	639.921.250	100	1.274.921.250
			3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	30	40	539.750.000	40	543.933.000	80	1.083.683.000
			3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	N/ A	1	15.875.000	2	16.038.250	3	31.913.250

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
			3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk	N/ A	30	79.375.000	30	79.950.000	60	159.325.000
			3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Kenaikan Omzet Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitas Kemitraan, Pameran dan Promosi lainnya	%	N/ A	35	415.000.000	40	418.216.250	40	833.216.250
			3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kali	3	4	415.000.000	5	418.216.250	9	833.216.250
			3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM Yang Memperoleh Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	UMKM	N/ A	100	290.500.000	100	292.751.375	200	583.251.375
			3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM Yang Memperoleh Fasilitas Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan Dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	65	700	124.500.000	800	125.464.875	800	249.964.875
	Meningkatnya Pelaksanaan Metrologi Legal	Indeks Tertib Ukur	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat UTTP Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	%	69	75	415.000.000	76	418.216.250	76	833.216.250
			3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelayanan Tera / Tera Ulang	%	67	70	415.000.000	75	418.216.250	75	833.216.250
			3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	6.670	7.000	311.250.000	7.500	313.666.250	7.500	624.916.250
			3.30.06.2.01.02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	N/ A	350	103.750.000	400	104.550.000	400	208.300.000

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing IKM dan Produk Lokal	Pertumbuhan Industri	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM Yang Memenuhi Standar	%	43,83	31	16.608.208.400	32	16.736.922.015	32	33.345.130.415
			3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Pembangunan dan Pemberdayaan IKM	Kali	12	12	16.608.208.400	12	16.736.922.015	24	33.345.130.415
			3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	N/ A	1	24.900.000	1	25.100.000	2	50.000.000
			3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	N/ A	1	16.600.000	1	16.700.000	2	33.300.000
			3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	N/ A	1	49.800.000	1	50.200.000	2	100.000.000
			3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	4	4	307.250.000	4	309.500.000	8	616.750.000
			3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	4	4	16.168.158.400	4	16.293.622.015	8	32.461.780.415
			3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	N/ A	1	16.600.000	1	16.700.000	2	33.300.000

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
			3.31.02.2.01.08	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/ Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi atau Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Dokumen	N/ A	1	24.900.000	1	25.100.000	2	50.000.000
			3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemantauan dan Pengawasan Izin Sektor Industri	%	N/A	75	20.000.000	80	20.155.000	80	40.155.000
			3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Verifikasi dan Pengawasan Izin Sektor Industri	kali	N/A	12	20.000.000	12	20.155.000	24	40.155.000
			3.31.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Industri Dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah Yang Berlokasi di Satu Kabupaten/ Kota Sepanjang Merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Selain Bidang Usaha Tertentu Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	Dokumen	N/ A	1	10.000.000	1	10.077.500	2	20.077.500

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
			3.31.03.2.01.04	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIinas) Yang Terintegrasi Dengan Sistem <i>Online Single Submission Risk Base Approach</i> (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Bidang Usaha Sektor Perindustrian Dengan Tingkat Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas Yang Terintegrasi Dengan Sistem OSS RBA, Bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, Selain Bidang Usaha Tertentu Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	Dokumen	N/ A	1	10.000.000	1	10.077.500	2	20.077.500
			3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data IKM Yang Masuk Dalam SIINas	%	6	9	1.650.000.000	9,5	1.662.787.500	9,5	3.312.787.500
			3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM Yang Sudah Memiliki Akun/ Melaporkan Kegiatan Usahanya di SIINas	IKM	N/ A	55	1.650.000.000	60	1.662.787.500	60	3.312.787.500
			3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	N/ A	1	330.000.000	1	332.557.500	2	662.557.500

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya Stabilitas Harga melalui Pengendalian Inflasi	Meningkatnya Stabilitas Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas	Dokumen	4	4	1.237.500.000	4	1.247.090.625	8	2.484.590.625
			3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	N/ A	1	82.500.000	1	83.139.375	2	165.639.375
			3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Penanganan Ketidakstabilan Harga dan Kelangkaan Bapokting	%	100	100	405.000.000	100	408.138.750	100	813.138.750
			3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi Penyediaan Bapokting	Kali	N/ A	18	10.125.000	18	10.200.000	36	20.325.000
			3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	N/ A	2	3.037.500	2	3.060.000	4	6.097.500
			3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	N/ A	2	3.037.500	2	3.060.000	4	6.097.500

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
			3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	N/ A	2	4.050.000	2	4.080.000	4	8.130.000
			3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Bapokting	Kali	12	12	354.375.000	12	357.138.750	24	711.513.750
			3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Laporan	4	4	35.400.000	4	35.600.000	8	71.000.000
			3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	N/ A	4	8.850.000	4	9.000.000	8	17.850.000
			3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Laporan	2	2	310.125.000	2	312.538.750	4	622.663.750
			3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kali	12	12	40.500.000	12	40.800.000	24	81.300.000

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
			3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	2	2	40.500.000	2	40.800.000	4	81.300.000
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian	LHE AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	%	100	100	8.131.945.862,36	100	8.194.968.443	100	16.326.914.305
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	%	95	95		95		95	
					Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	%	80,24	81		82		82	
			3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan RB	Dokumen	12	12	12.200.000	12	12.300.000	24	24.500.000
			3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	6.100.000	4	6.150.000	8	12.250.000
			3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	10	6.100.000	10	6.150.000	20	12.250.000
			3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	6.098.980.862,36	12	6.146.318.443	24	12.245.299.305
			3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	39	39	6.059.337.487,36	39	6.106.368.443	39	12.165.705.930
			3.30.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	73	75	39.643.375	75	39.950.000	150	79.593.375
			3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	%	100	100	406.590.000	100	409.750.000	100	816.340.000
			3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	8.131.800	2	8.195.000	4	16.326.800
			3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	30.494.250	4	30.731.250	8	61.225.500

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
			3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	30.494.250	4	30.731.250	8	61.225.500
			3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	2.032.950	1	2.048.750	2	4.081.700
			3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	58	75	284.613.000	75	286.825.000	150	571.438.000
			3.30.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/ A	1	50.823.750	1	51.218.750	2	102.042.500
			3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan BMD	paket	8	8	142.300.000	8	143.400.000	16	285.700.000
			3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	8	99.610.000	7	100.380.000	15	199.990.000
			3.30.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	24	27	42.690.000	27	43.020.000	54	85.710.000
			3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	1.077.475.000	100	1.085.800.000	100	2.163.275.000
			3.30.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	65	30	5.387.375	30	5.429.000	60	10.816.375
			3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	118.522.250	12	119.438.000	24	237.960.250
			3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	12	953.565.375	12	960.933.000	24	1.914.498.375

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
			3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan BMD	%	100	100	162.650.000	100	163.850.000	100	326.500.000
			3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	15	73.192.500	15	73.732.500	15	146.925.000
			3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	39	40	16.265.000	40	16.385.000	40	32.650.000
			3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	2	56.927.500	3	57.347.500	3	114.275.000
			3.30.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	13	14	16.265.000	16	16.385.000	16	32.650.000
			3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas ASN	kali	4	5	231.750.000	5	233.550.000	10	465.300.000
			3.30.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	3	34.762.500	3	35.032.500	6	69.795.000
			3.30.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	59	59	57.937.500	59	58.387.500	118	116.325.000
			3.30.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	N/ A	30	139.050.000	30	140.130.000	50	279.180.000

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang merujuk pada tujuan dan sasaran RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah ukuran langsung dari kinerja yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang merujuk pada tujuan dan sasaran RPD dilakukan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang memberikan kontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD. Langkah terakhir adalah mengidentifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang memberikan kontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD.

Dalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri yang merujuk pada tujuan dan sasaran RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung mencerminkan kinerja yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Kediri. Dengan demikian, indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran atau kegiatan yang diukur. Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri yang pencapaiannya berkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 di bawah ini:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Capaian Pada Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
				2025	2026	
1	Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	%	N/ A	32	33	33
2	Persentase Promosi Produk Lokal/ Potensial Ekspor	%	12,25	13,66	15,08	15,08
3	Indeks Tertib Ukur	%	71,24	73	75	75
4	Pertumbuhan Industri	%	55,9	12,8	13	13
5	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	%	4,19	8,5	8	8
6	Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian	%	88,2	90	91	91

Sementara itu, Indikator Kinerja Program yang merujuk pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026 terdapat dalam tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program Yang Mengacu Pada RPD Kota Kediri
Tahun 2025-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Capaian Pada Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
				2025	2026	
1	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	N/ A	24	26	26
2	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibina	%	N/ A	18	20	20
3	Persentase Pelaku Usaha Yang Menjadi Eksportir	%	21,2	24	25	25
4	Persentase Kenaikan Omzet Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitas Kemitraan, Pameran dan Promosi lainnya	%	N/ A	35	40	40
5	Persentase alat-alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	%	69	75	76	76
6	Persentase IKM yang memenuhi standar	%	43,83	31	32	32
7	Persentase Pemantauan dan Pengawasan Izin Sektor Industri	%	N/ A	75	80	80
8	Persentase data IKM yang masuk dalam SIINas	%	5,19	9	9,5	9,5
9	Persentase Penanganan Ketidakstabilan Harga dan Kelangkaan Bapokting	%	100	100	100	100
10	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	%	100	100	100	100
11	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	%	95	95	95	95
12	Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	%	80,24	81	82	82

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri untuk periode 2025-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Kediri selama dua tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan pendanaan, serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, evaluasi akan dilakukan setiap tahun. Jika diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, termasuk indikator kinerjanya, sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri.

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri periode 2025-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Harapannya, semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja, dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2025–2026 diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman kepada seluruh personil Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri serta stakeholder. Hal ini bertujuan membangun kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri secara berkesinambungan. Selanjutnya, diharapkan Renstra ini dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, menciptakan keselarasan, dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai dengan kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri.

LAMPIRAN I

MATRIKS RENCANA STRATEGIS
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA KEDIRI TAHUN 2025 – 2026

TUJUAN 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah
SASARAN 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan
TUJUAN 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Dan Berkelanjutan
SASARAN 8 : Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Daerah, Khususnya Sektor Perdagangan Dan Jasa
SASARAN 10 : Terkendalinya Harga Bahan Kebutuhan Pokok dan Penting

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Bidang Pemangku
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Nilai Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan dan Promosi serta Pemasaran Produk Lokal/ Potensial Ekspor	Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan efisiensi dan kualitas sarana distribusi perdagangan, promosi, dan pemasaran produk lokal/ potensial ekspor, serta peningkatan pelaksanaan metrologi legal	Meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses perizinan perdagangan dan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha distribusi barang	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Pengembangan Perdagangan
						Meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan distribusi barang	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pengembangan Perdagangan
						Mengoptimalkan infrastruktur distribusi untuk mendukung pertumbuhan sektor perdagangan		

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Bidang Pemangku
				Persentase Promosi Produk Lokal/ Potensial Ekspor		Meningkatkan pangsa pasar ekspor bagi produk lokal	Program Pengembangan Ekspor	Pengembangan Perdagangan
						Memperkuat kerjasama dengan instansi/ lembaga terkait untuk mendukung ekspansi ekspor		
						Meningkatkan konsumsi produk dalam negeri melalui promosi dan kampanye serta edukasi	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pengembangan Perdagangan
			Meningkatnya Pelaksanaan Metrologi Legal	Indeks Tertib Ukur		Meningkatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang pentingnya metrologi legal bagi produsen dan konsumen	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Kemetrologian
						Meningkatkan pelayanan metrologi legal		
						Kolaborasi dengan instansi/ lembaga terkait standardisasi alat ukur		

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Bidang Pemangku
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Nilai Peningkatan PDRB Sektor Perindustrian	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing IKM dan Produk Lokal	Pertumbuhan Industri	Peningkatan kualitas dan daya saing Industri Kecil Menengah (IKM) serta produk lokal	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menyongsong dan merespon dinamika Revolusi Industri 4.0.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Perindustrian
						Mendorong diversifikasi industri untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah		
						Meningkatkan pembinaan dan pendampingan industri dalam pengembangan usaha		
						Meningkatkan efektivitas pengendalian izin usaha industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Perindustrian
						Memfasilitasi akses yang mudah dan cepat terhadap informasi industri bagi pemangku kepentingan	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Perindustrian

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Bidang Pemangku
						Mendorong penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan industri		
3	Meningkatnya Stabilitas Harga melalui Pengendalian Inflasi	Indeks Stabilitas Harga	Meningkatnya Stabilitas Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	Peningkatan stabilisasi harga dan ketersediaan Bapokting melalui optimalisasi stok dan distribusi barang untuk merespons kebutuhan pasar dan mengendalikan inflasi	Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Meningkatkan efisiensi distribusi barang kebutuhan pokok untuk mencegah/ mengendalikan fluktuasi harga yang tajam	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengembangan Perdagangan
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri	Nilai SAKIP Kota Kediri	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian	LHE AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Peningkatan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan, kualitas SDM dan sistem monitoring dan evaluasi	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja, keuangan dan aset Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sekretariat

Program	Indikator	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi dan Pemantauan Izin Sektor Perdagangan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
				Fasilitasi Pembinaan dan Pemantauan Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Distributor, Agen, Grosir/Perkulakan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Perizinan Berusaha Melalui Sistem Elektronik	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pemantauan Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Distributor, Agen, Grosir/Perkulakan Dan Toko Swalayan Melalui Sistem Perizinan Berusaha Melalui Sistem Elektronik
		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Pelayanan Rekomendasi Penerbitan TDG	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibina	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Dibangun/ Dikelola	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan
				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
				Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Program	Indikator	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pelaku Usaha Yang Menjadi Eksportir	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi promosi dan pembinaan ekspor	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang
				Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan
				Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Kenaikan Omzet Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitasi Kemitraan, Pameran dan Promosi lainnya	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM Yang Memperoleh Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM Yang Memperoleh Fasilitasi Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan Dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelayanan Tera / Tera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang
				Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang memenuhi standar	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Pembangunan dan Pemberdayaan IKM	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Program	Indikator	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
				Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
				Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/ Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi atau Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Persentase Pemantauan dan Pengawasan Izin Sektor Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Verifikasi dan Pengawasan Izin Sektor Industri	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Industri Dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah Yang Berlokasi di Satu Kabupaten/ Kota Sepanjang Merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Selain Bidang Usaha Tertentu Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat
				Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar

Program	Indikator	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
				Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas) Yang Terintegrasi Dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Bidang Usaha Sektor Perindustrian Dengan Tingkat Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas Yang Terintegrasi Dengan Sistem OSS RBA, Bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, Selain Bidang Usaha Tertentu Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data IKM yang masuk dalam SIINas	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM Yang Sudah memiliki Akun / Melaporkan Kegiatan Usahnya di SIINas	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
				Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas
				Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

Program	Indikator	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Penanganan Ketidakstabilan Harga dan Kelangkaan Bapokting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi Penyediaan Bapokting	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
				Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Bapokting	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota

Program	Indikator	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan RB	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Program	Indikator	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
	Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan kapasitas ASN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Program	Indikator	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

LAMPIRAN II

RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA KEDIRI TAHUN 2025 - 2026 (Berbasis Tujuan)

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Nilai Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	PDRB Sektor Perdagangan tahun [n - (n-1)]	Triliun Rupiah	1,48	1,55	1,65
2	Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan	Nilai Peningkatan PDRB Sektor Industri	PDRB Industri Pengolahan tahun [n - (n-1)]	Triliun Rupiah	3,96	4	4,2
3	Meningkatnya stabilitas harga dalam rangka penurunan kemiskinan	Indeks Stabilitas Harga	Indeks Stabilitas Harga tahun n	-	N/ A	110	108
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri	Nilai SAKIP Kota Kediri	Realisasi nilai SAKIP Pemerintah Kota Kediri tahun n	-	71,98	73	75

RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA KEDIRI TAHUN 2025 - 2026 (Berbasis Sasaran)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
1	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan dan Promosi serta Pemasaran Produk Lokal/ Potensial Ekspor	Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan tahun {[n - (n-1)] / (n-1)} x 100%	%	N/ A	32	33
		Persentase Promosi Produk Lokal/ Potensial Ekspor	Jumlah Produk Lokal/ Potensial Ekspor yang Dipromosikan / Jumlah Produk Lokal/ Potensial Ekspor x 100%	%	N/ A	13,66	15,08
2	Meningkatnya Pelaksanaan Metrologi Legal	Indeks Tertib Ukur	(68,4% x persentase UTTP bertanda tera sah) + (31,6% x persentase BDKT memenuhi kesesuaian pelabelan dan kuantitas)	%	71,24	73	75
3	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing IKM dan Produk Lokal	Pertumbuhan Industri	Jumlah Industri thn {[n - (n-1)] / (n-1)} x 100%	%	55,9	12,8	13
4	Meningkatnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	Rata-rata Standar Deviasi Harga Komoditas Tahun ke-n / Rata-rata Harga Komoditas Tahun ke-n x 100%	%	4,19	8,5	8
5	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian	LHE AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Realisasi nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun n	-	88,2	90	91

RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA KEDIRI TAHUN 2025 - 2026 (Berbasis Program)

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan / Jumlah pelaku usaha x 100%	%	N/ A	24	26
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibina	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibina s.d tahun n / Jumlah sarana distribusi perdagangan s.d tahun n x 100%	%	N/A	18	20
3	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pelaku Usaha Yang Menjadi Eksportir	Jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir s.d tahun n / Jumlah IKM produk unggulan/ potensial ekspor s.d tahun n x 100%	%	21,20	24	25
4	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase kenaikan omzet pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi kemitraan, pameran dan promosi lainnya	Jumlah pelaku usaha yang omzetnya naik yang memperoleh fasilitasi kemitraan, pameran dan promosi lainnya / Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi kemitraan, pameran dan promosi lainnya x 100%	%	N/ A	35	40
5	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun n / Jumlah UTTP yang terdata sampai dengan tahun n x 100%	%	69	75	76
6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang memenuhi standar	Jumlah IKM yang memenuhi standar s.d tahun n / Jumlah IKM s.d tahun n x 100%	%	43,83	31	32

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
7	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Persentase Pemantauan dan Pengawasan Izin Sektor Industri	Jumlah izin sektor industri yang dipantau dan diawasi / Jumlah izin sektor industri yang dikeluarkan x 100%	%	N/ A	75	80
8	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data IKM yang masuk dalam SIINas	Jumlah IKM yang masuk SIINas s.d tahun n / Jumlah IKM wajib SIINas s.d tahun n x 100%	%	5,19	9	9,5
9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Penanganan Ketidakstabilan Harga dan Kelangkaan Bapokting	Jumlah penanganan ketidakstabilan harga & kelangkaan Bapokting / Jumlah kejadian x 100%	%	100	100	100
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	Jumlah kriteria Renja yang terpenuhi pada seluruh program / (Jumlah program x kriteria Renja) x 100 %	%	100	100	100
		Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	Jumlah kriteria yang terpenuhi pada seluruh laporan keuangan dan aset / (Jumlah laporan keuangan dan aset x kriteria laporan) x 100 %	%	95	95	95
		Realisasi nilai IPA tahun n	Realisasi nilai IPA tahun n	%	80,24	81	82

RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA KEDIRI TAHUN 2025 - 2026 (Berbasis Kegiatan)

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi dan Pemantauan Izin Sektor Perdagangan	Jumlah pelayanan rekomendasi dan pemantauan izin sektor perdagangan tahun n	Kali	N/ A	12	12
2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Pelayanan Rekomendasi Penerbitan TDG	Jumlah rekomendasi TDG yang terbit tahun n / Jumlah permohonan rekomendasi TDG tahun n x 100%	%	N/ A	100	100
3	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Dibangun/ Dikelola	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/ dikelola sampai dengan tahun n	Unit	N/ A	11	11
4	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Total kegiatan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi tahun n	Kali	12	12	12
5	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi promosi dan pembinaan ekspor	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi promosi dan pembinaan ekspor tahun n	pelaku usaha	N/ A	50	50
6	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah kegiatan promosi dan pemasaran produk dalam negeri tahun n	Kali	3	4	5
7	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelayanan Tera / Tera Ulang	Jumlah pelayanan tera atau tera ulang tahun n / Jumlah permohonan tera atau tera ulang	%	67	70	75

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
8	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Pembangunan dan Pemberdayaan IKM	Jumlah kegiatan pembangunan dan pemberdayaan IKM tahun n	Kali	12	12	12
9	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Verifikasi dan Pengawasan Izin Sektor Industri	Jumlah kegiatan verifikasi dan pengawasan izin sektor industri tahun n	kali	N/ A	12	12
10	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM Yang Sudah Memiliki Akun/ Melaporkan Kegiatan Usahnya di SIINas	Jumlah IKM yang sudah memiliki akun atau melaporkan kegiatan usahanya di SIINas sampai dengan tahun n	IKM	N/ A	55	60
11	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi Penyediaan Bapokting	Jumlah kegiatan koordinasi penyediaan Bapokting tahun n	Kali	N/ A	18	18
12	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Bapokting	Total kegiatan pengawasan dan pengendalian Bapokting tahun n	Kali	12	12	12
13	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi tahun n	Kali	12	12	12

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
14	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan RB	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi kinerja, dan RB tahun n	dokumen	12	12	12
15	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan	Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan tahun n	bulan	12	12	12
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	Jumlah pelayanan administrasi umum terlaksana / Jumlah total pelayanan administrasi umum yang direncanakan x 100%	%	100	100	100
17	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah penyediaan jasa yang terlaksana / Jumlah penyediaan jasa yang direncanakan x 100%	%	100	100	100
18	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD	Jumlah paket pengadaan BMD	paket	8	8	8
19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD	Jumlah pemeliharaan BMD yang terlaksana / Jumlah pemeliharaan BMD yang direncanakan x 100%	%	100	100	100
20	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan kapasitas ASN	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas ASN	kali	4	5	5

RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA KEDIRI TAHUN 2025 - 2026 (Berbasis Subkegiatan)

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen tahun n	Dokumen	N/ A	2	2
2	Fasilitasi Pembinaan dan Pemantauan Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Distributor, Agen, Grosir/ Perkulakan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Perizinan Berusaha Melalui Sistem Elektronik	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pemantauan Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Distributor, Agen, Grosir/ Perkulakan Dan Toko Swalayan Melalui Sistem Perizinan Berusaha Melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/ perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik tahun n	Laporan	N/ A	2	2
3	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah dokumen Tanda Daftar Gudang tahun n	Dokumen	N/ A	10	12
4	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan tahun n	Unit	126	145	155
5	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan tahun n	Unit	3	7	9
6	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian tahun n	Dokumen	2	2	2

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
7	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian tahun n	Dokumen	N/ A	1	1
8	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang tahun n	Pelaku Usaha	30	40	40
9	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan tahun n	Pelaku Usaha	N/ A	1	2
10	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi tahun n	Produk	N/ A	30	30
11	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM Yang Memperoleh Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM Yang Memperoleh Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota tahun n	UMKM	N/ A	100	100
12	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM Yang Memperoleh Fasilitas Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan Dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM Yang Memperoleh Fasilitas Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan Dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi tahun n	UMKM	65	700	800
13	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah UTP yang ditera atau tera ulang tahun n	Unit	6.670	7.000	7.500
14	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan atau pembinaan tahun n	Orang	N/ A	350	400

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
15	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Industri Dokumen Rencana Pembangunan	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri tahun n	Dokumen	N/ A	1	1
16	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi industri, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan tahun n	Dokumen	N/ A	1	1
17	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri tahun n	Dokumen	1	1	1
18	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri tahun n	Dokumen	4	4	4
19	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat tahun n	Dokumen	4	4	4
20	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri tahun n	Dokumen	N/ A	1	1

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
21	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/ Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi atau Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi atau Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan tahun n	Dokumen	N/ A	1	1
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Industri Dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah Yang Berlokasi di Satu Kabupaten/ Kota Sepanjang Merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Selain Bidang Usaha Tertentu Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan tahun n	Dokumen	N/ A	1	1
23	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas) Yang Terintegrasi Dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Bidang Usaha Sektor Perindustrian Dengan Tingkat Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas Yang Terintegrasi Dengan Sistem OSS RBA, Bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dengan	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan tahun n Jumlah dokumen yang dihasilkan dari verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian tahun n	Dokumen	N/A	1	1

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
		Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, Selain Bidang Usaha Tertentu Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat					
24	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari fasilitasi data industri tahun n	Dokumen	N/ A	1	1
25	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari diseminasi dan publikasi data industri tahun n	Dokumen	4	4	4
26	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri	Dokumen	N/ A	1	1
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan yang dihasilkan dari koordinasi dan sinkronisasi tahun n	Laporan	N/ A	2	2

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan yang dihasilkan dari koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas tahun n	Laporan	N/ A	2	2
29	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan yang dihasilkan dari pengendalian stok atau ketersediaan Bapokting tahun n	Laporan	N/ A	2	2
30	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan yang dihasilkan dari pemantauan harga dan stok tahun n	Laporan	4	4	4
31	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah laporan yang dihasilkan dari pemantauan harga dan stok pada pasar rakyat tahun n	Laporan	N/ A	4	4
32	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan yang dihasilkan dari pelaksanaan operasi pasar tahun n	Laporan	2	2	2

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
33	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah laporan yang dihasilkan dari pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi tahun n	Laporan	2	2	2
34	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah tahun n	Dokumen	4	4	4
35	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang dihasilkan oleh perangkat daerah tahun n	Laporan	10	10	10
36	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah individu yang menerima gaji dan tunjangan sebagai ASN tahun n	Orang/ bulan	39	39	39
37	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang terkait dengan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan oleh SKPD tahun n	Dokumen	73	75	75
38	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket komponen yang disediakan untuk instalasi listrik/ penerangan di bangunan kantortahun n	Paket	2	2	2
39	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket yang berisi peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan tahun n	Paket	4	4	4
40	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah paket yang berisi barang cetak dan penggandaan yang disediakan tahun n	Paket	4	1	1

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
41	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah dokumen yang berisi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan tahun n	dokumen	1	1	1
42	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tahun n	Laporan	48	75	75
43	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen terkait penatausahaan arsip dinamis pada SKPD tahun n	Dokumen	0	1	1
44	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan di SKPD tahun n	Unit	10	8	7
45	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan di SKPD tahun n	Unit	24	27	27
46	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat di SKPD tahun n	Laporan	65	30	30
47	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik di SKPD tahun n	Laporan	12	12	12
48	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor di SKPD tahun n	Laporan	6	12	12
49	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak serta perizinannya di SKPD tahun n	Unit	17	15	15

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
50	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara di SKPD tahun n	Unit	39	40	40
51	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi di SKPD tahun n	Unit	1	2	3
52	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi di SKPD tahun n	Unit	12	14	16
53	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai di SKPD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi tahun n	Orang	2	3	3
54	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan di SKPD tahun n	Orang	59	59	59
55	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di SKPD tahun n	Orang	0	30	30